

DKP

"Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah,
Lebih Sejahtera & Lebih Maju"

RENCANA KERJA 2023
DINAS KELAUTAN & PERIKANAN

RENJA PERUBAHAN 2023

Renja DKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Menjabarkan Prioritas dan Target Setiap Program Kegiatan Tahun 2023 yang ditetapkan dalam Renstra DKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026



Jl. Undata No 7
Kota Palu



0451- 421560 - 429379



dkpprovsulteng@gmail.com

www.dkp.sultengprov.go.id



DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Hidayah dan Rahmat-Nya, penulisan dan penyusunan ”**Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**” dapat terselesaikan. Laporan ini disusun sebagai salah satu acuan pelaksana kegiatan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Tahun 2023.

Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai Rencana dan Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya mensinergikan program pusat dan daerah dalam menyongsong visi dan misi pemerintah di Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Perubahan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu, kritik dan saran membangun sangat diperlukan sebagai modal dasar perbaikan dan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di masa datang. Pada kesempatan ini pula kami mengaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Palu, 28 April 2023

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



H. MOH. ARIE LATJUBA, SE, M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19600418 199203 1 009

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penyusunan.....	7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng.....	32
2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas	35
2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng.....	35
2.3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
2.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Renstra K/L	41
2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..	43
2.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah.....	43
2.5.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	45
2.6 Penataan Isu- Isu Strategis	46
2.7 Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	47

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	50
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.1.1 Telaah Terhadap RPJMN 2020- 2024.....	50
3.1.2 Sinergitas RPJMN, RKP 2023, RENSTRA KKP RI dalam Mendukung Program Nasional.....	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	55
3.3 Program dan Kegiatan.....	56
3.4 Pendanaan Program dan Kegiatan 2020 dan Rencana 2023	58

3.5 Fokus Utama Program Dan Kegiatan Tahun 2023	64
3.5.1 Sekretariat	64
3.5.2 Perikanan Tangkap.....	64
3.5.3 Perikanan Budidaya dan P2HP	65
3.5.4 Pengelolaan Ruang Laut.....	66
3.5.5 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	67
3.5.6 UPTD Balai Perbenihan Perikanan	67
3.5.7 UPTD PMHP	68
3.5.8 UPTD Wilayah I, II, III, IV.....	68
3.5.9 UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	69

BAB IV

PENUTUP.....	70
---------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi DKP SULTENG Tahun 2021.....	8
Tabel 2. Jenis Perijinan Bidang Kelautan dan Perikanan Di Sulteng	9
Tabel 3. Capaian Nilai Tukar Perikanan Budidaya (NTPi) per Bulan Sulawesi Tengah Tahun 2021	11
Tabel 4. Capaian NTN Sulawesi Tengah tahun 2021	12
Tabel 5. Capaian IKU 3 dan 4 terhadap Renstra KP 2016-2021	13
Tabel 6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional Sasaran 2	13
Tabel 7. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran 2 Tahun 2021.....	14
Tabel 8. Capaian IKU 5 terhadap Renstra KP 2016-2021	15
Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional Sasaran 3	15
Tabel 10. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 3 Tahun 2021	15
Tabel 11. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 3 T. 2021	16
Tabel 12. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran 3 Tahun 2021.....	16
Tabel 13. Nilai Ekspor Hasil Perikanan.....	17
Tabel 14. Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021 Per Kab/ Kota	17
Tabel 15. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021 Per Kab/ Kota	18
Tabel 16. Capaian IKU 6, 7 dan 8 terhadap RENSTRA KP 2016-2021	18
Tabel 17. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional Sasaran 4	19
Tabel 18. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 4 Tahun 2021	19
Tabel 19. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 4 T.2021	20
Tabel 20. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran 4 Tahun 2021.....	20
Tabel 21. Capaian IKU 9 terhadap Renstra KP 2016-2021	23
Tabel 22. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional Sasaran 5	23
Tabel 23. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 5 Tahun 2021	23
Tabel 24. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 5 Tahun 2021	23
Tabel 25. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran 5 Tahun 2021.....	24
Tabel 26. Capaian IKU 10 Terhadap Renstra KP 2016-2021	26
Tabel 27. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional Sasaran 6	26
Tabel 28. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 6 Tahun 2021	26
Tabel 29. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 6 Tahun 2021	27
Tabel 30. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran 6 Tahun 2021	27
Tabel 31. Capaian IKU 11 Terhadap Renstra KP 2016-2021	28
Tabel 32. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional Sasaran 7	28
Tabel 33. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 7 Tahun 2021	29
Tabel 34. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 7 Tahun 2021	29

Tabel 35. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran 7 Tahun 2021.....	29
Tabel 36. Kawasan Konservasi Perairan di Sulawesi Tengah	30
Tabel 37. Capaian IKU 12 Terhadap Renstra KP 2016-2021	30
Tabel 38. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional Sasaran 8	30
Tabel 39. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 8 Tahun 2021	31
Tabel 40. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 8 Tahun 2021	31
Tabel 41. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran 7 Tahun 2021.....	31
Tabel 42. Target dan Realisasi DKP Sulteng Tahun 2022.....	32
Tabel 43. Capaian Nilai Tukar Perikanan (NTP) Kepala Sulawesi Tengah Tahun 2022	33
Tabel 44. Kawasan Konservasi Perairan di Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2022	34
Tabel 45. Produksi Perikanan Tahun 2022 Per Kabupaten/Kota.....	35
Tabel 46. Perbandingan Capaian IKU tahun 2021-2022	36
Tabel 47. Capaian IKU terhadap Renstra KP 2021-2026	38
Tabel 48. Perbandingan Capaian IKU Dinas dengan Capaian Nasional Tahun 2022	39
Tabel 49. Alokasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis.....	41
Tabel 50. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis	42
Tabel 51. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.....	42
Tabel 52. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	49
Tabel 53. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	52
Tabel 54. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	55
Tabel 55. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	56
Tabel 56. Identifikasi Isu Isu Strategis.....	57
Tabel 57. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023	67
Tabel 58. Pendanaan Program dan Kegiatan 2022 dan Rencana 2023.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bandeng Bebas Duri	21
Gambar 2. Pengembangan rumput Laut Sistem Kultur Jaringan di Dinas Kelautan dan Perikanan prov. Sulteng.....	21
Gambar 3. Budidaya Udang Vaname Kolam Bundar Skala Rakyat	22
Gambar 4. Kolam Sistem Bioflok	22
Gambar 5. Pembangunan Turap dan Pabrik es 10 Ton di PPI Mato	24
Gambar 6. Pengembangan PPI Paranggi Kabupaten Parigo Moutong	25
Gambar 7. Pengembangan Instalasi Mambooro	25
Gambar 8. Pengembangan Unit Pembenihan Tindaki	25
Gambar 9. Kantor Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pulau- Pulau Kecil di Kabupaten Buol	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Pembangunan di Daerah diwajibkan untuk dapat menyusun perencanaan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap tuntutan dari keinginan masyarakat luas di daerah masing-masing dan mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah telah memuat berbagai usulan dan rencana kerja serta program-program kegiatan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.

Penyusunan Rencana Kerja untuk tahun 2023 ini pada dasarnya mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026.

Menarik benang merah serta korelasi dan integrasi program dan kegiatan yang terpadu, sangat diperlukan lompatan pemikiran dalam penyusunan Rencana Kerja yang mumpuni, akuntabel, terupdate, dengan memperhatikan tolak ukur program/kegiatan berdasarkan output, outcome, benefit, dan impact dari berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengusung visi dan misi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan cepat, baik dan penuh rasa tanggung jawab dalam rangka menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Guna dapat mewujudkan visi dan misi Pemerintah daerah Sulawesi Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah kemudian menyusun Rencana Kerja (RENJA) untuk tahun 2023. Diharapkan dengan perencanaan yang baik dapat menjalankan program pembangunan daerah Sulawesi Tengah dengan cepat dan tepat sasaran.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan Ruang;
 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagai diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 34. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaiman telah diubah terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Wilayah Terpadu;
 40. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
 41. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
 42. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 45. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Tehnis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 46. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Tehnis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
51. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
52. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
53. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
54. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
55. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah);
56. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2037;
57. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
58. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
59. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
60. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;
61. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
62. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2018-2021.
63. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 ini adalah untuk memberikan arah bagi pencapaian sasaran pembangunan melalui penetapan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2023.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 adalah:

- a. Sebagai pedoman perencanaan bidang kelautan dan perikanan dalam mencapai sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2023 yang mengacu pada RPJMD 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026 serta Rancangan Teknokratik Renstra KKP RI 2020-2024.
- b. Memberi penajaman orientasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TA. 2021/2022 DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja TA. 2021/2022 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
 - 2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
 - 2.3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Renstra K/L
- 2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 2.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah
 - 2.5.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 2.6 Penentuan Isu-isu Strategis
- 2.7 Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan
- 3.4 Pendanaan Program dan Kegiatan 2022 dan 2023

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TA. 2021/2022
DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja TA. 2021/2022

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja TA. 2021

Pada tahun 2021 DKP Sulteng mendapat alokasi anggaran (APBD) sebesar Rp. 73.653.917.129,- untuk belanja gaji dan tunjangan Rp. 17.156.260.146,- dan untuk belanja langsung dengan total Rp. 56.497.656.983,-. Secara keseluruhan, sampai dengan 31 Desember 2021, realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 67.533.087.592,- (91,69%). Realisasi tidak mencapai 100% berasal dari sisa kontrak baik DAK dan reguler, sisa perjalanan dinas, sisa pembayaran listrik, air dan telepon.

Sasaran yang telah dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2021, adalah:

Tabel 1. Target dan Realisasi DKP Sulteng Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase	Kode
1	Terselenggaranya regulasi-deregulasi untuk peningkatan dan pengelolaan produksi serta kegiatan konservasi	1. Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap peraturan dan per-UU yang berlaku (%)	65	91,94	141,45	
		2. Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan per-UU (%)	75	100	133,33	
2	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat KP	3. Nilai tukar perikanan budidaya (%)	87,00	99,94	114,87	
		4. Nilai tukar perikanan tangkap (%)	108,76	103,27	94,95	
3	Terwujudnya ketahanan pangan bidang KP di Sulteng	5. Jumlah Konsumsi Makan Ikan (kg/kap/th)	53,83	67,04	124,54	
4	Terwujudnya pengelolaan dan peningkatan produksi KP	6. Nilai ekspor hasil perikanan (USD)	3.784.000	1.132.001,29	29,92	
		7. Jumlah hasil produksi budidaya (ton)	1.221.858	731.966,59	59,91	
		8. Jumlah hasil produksi tangkap (ton)	251.686	207.940,50	82,62	
5	Tersedianya teknologi berkelanjutan untuk peningkatan dan pengelolaan produksi	9. Jumlah inovasi kelautan dan perikanan yang diterapkan (buah)	4	4	100	
6	Tersedianya infrastruktur untuk peningkatan dan pengelolaan produksi	10. Jumlah sentra KP yang ditingkatkan infrastrukturnya (unit/sentra)	4	5	125	
7	Terselenggaranya kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran pelaku usaha	11. Nilai pembiayaan usaha hasil KP dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp. Juta)	120.000	857.997,51	715,00	
8	Terwujudnya peningkatan konservasi KP	12. Luas kawasan konservasi (Ha)	1.200.000	1.338.291,55	111,52	

* angka sementara

Analisis capaian kinerja per sasaran strategis tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran 1: Terselenggaranya regulasi-deregulasi untuk peningkatan dan pengelolaan produksi serta kegiatan konservasi

❖ *IKU 1 Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*

Nilai ini merupakan persentase dari jumlah usaha kelautan dan perikanan yang memiliki ijin per total keseluruhan jumlah usaha kelautan dan perikanan yang ada. Tahun 2021 ditetapkan target sebesar 65% dan terealisasi 91,94% dimana dari 273 pelaku usaha yang terbina terdapat 251 pelaku usaha yang mengajukan perijinan. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 dimana dari 273 pelaku usaha terbina terdapat 234 yang telah mengajukan ijin, angka ini tentu menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 7,26 %. Upaya peningkatan kesadaran perijinan ini akan terus dilakukan baik melalui pendampingan, sosialisasi maupun pengawasan.

Berikut nama jenis perijinan bidang kelautan dan perikanan serta jumlahnya di Sulawesi Tengah:

Tabel 2. Jenis Perijinan Bidang Kelautan dan Perikanan Di Sulteng

No	Jenis Perijinan	Jumlah
1.	Izin pelaksanaan reklamasi	1
2.	Izin Pelaksanaan Perairan	1
3.	Surat Izin Usaha Perikanan (BUD)	9
4.	Surat Izin Penangkapan Ikan (WPPNRI)	36
5.	Surat Izin Penangkapan Ikan, Perpanjangan (WPPNRI)	103
6.	Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT)	11
7.	Perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT)	39
8.	Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI)	3
9.	Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-P)	34
10.	SIPI Andon Kapal Penangkapan Ikan Berukuran di atas 5 GT sd. 30 GT	8
11.	Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan Pelabuhan ke Pelabuhan (SIKPI-PP)	2
12.	Perpanjangan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan Pelabuhan ke Pelabuhan (SIKPI-PP)	3
13.	Nomor Surat Tanda Keterangan Andon (STKA)	1
T O T A L		251

❖ *IKU 2 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perUU*

Nilai ini diperoleh melalui cara perhitungan persentase jumlah kasus perikanan yang telah P21 per jumlah total kasus yang ada. Tahun 2021 target 75% dan terealisasi 100% dimana terdapat 1 (satu) kasus *destructive fishing* (pengeboman) ditemukan di wilayah perairan Sulawesi Tengah, yakni di kabupaten Parigi Moutong dan telah selesai P21. Demikian pula pada tahun 2020 ditemukan 1 (satu) kasus tindak pidana pengeboman ikan yang terjadi pada wilayah kerja pengawasan PSDKP DKP Sulteng yakni di Kabupaten Morowali yang juga telah P21. Upaya terhadap peningkatan kegiatan pengawasan di Sulawesi Tengah terus dilakukan, baik dari peningkatan sarpras maupun dari peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dimana berdasarkan SK Menteri kelautan dan Perikanan RI No.149/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Pengawas Perikanan pada Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 37 orang pengawas

perikanan yang tersebar di kabupaten/kota Sulawesi Tengah. Pada tahun 2021 juga diadakan pelatihan kepada 22 calon pengawas perikanan dari seluruh wilayah di Sulawesi Tengah dan masih menunggu SK Menteri KP untuk ditugaskan sebagai pengawas perikanan.

Capaian indikator kinerja utama 1 (satu) dan 2 (dua) dari sasaran strategis (SS) 1 (satu) terhadap Rencana Strategis (Renstra) DKP Sulteng 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Indikator Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (%) dan Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan (%) telah mencapai/melebihi target tahun terakhir renstra 2016-2021.

Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melalui Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP) menetapkan target untuk indikator kinerja Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebesar 95% dan terealisasi 63,56%. Capaian ini masih merupakan capaian sementara karena masih merupakan data triwulan I dan diperkirakan akan naik pada saat perhitungan di akhir triwulan IV. Capaian Sulteng telah melebihi dari capaian nasional. Beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan capaian ini antara lain adalah (1) konsistensi dalam melakukan pengawasan sumberdaya kelautan perikanan disertai dengan pemberian pemahaman secara komprehensif kepada pelaku usaha dan (2) kegiatan sosialisasi secara terus menerus diantaranya penyadartahuan yang gencar dilakukan kepada masyarakat khususnya di wilayah yang rawan terjadi *praktik illegal dan destructive fishing*.

Dalam pencapaian sasaran Terselenggaranya regulasi-deregulasi untuk peningkatan dan pengelolaan produksi serta kegiatan konservasi didukung oleh 1 (satu) program yakni program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 137,39%.

Sasaran 2: Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

❖ *IKU 3 Nilai Tukar Perikanan Budidaya (NTPi)*

merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya ikan. Juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produksi budidaya ikan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTPi di atas angka 100 dapat diartikan bahwa pembudidaya mengalami surplus (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha melebihi pertumbuhan pengeluaran rumah tangga), NTPi sama dengan 100 berarti pembudidaya mengalami titik impas (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha sama dengan pengeluaran rumah tangga) dan NTPi di bawah 100 berarti pembudidaya mengalami defisit (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha di bawah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga).

Secara sederhana angka NTPi diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani/nelayan/pembudidaya (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani/nelayan/pembudidaya (Ib).

Mulai Januari 2020 dilakukan perubahan tahun dasar penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) dari tahun dasar (2012=100) menjadi tahun dasar (2018=100) baik untuk It maupun Ib. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan indeks harga 2018=100 dibandingkan dengan indeks harga 2012=100, khususnya mengenai paket komoditas maupun diagram timbang pada masing-masing subsektor yakni Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. Pada Subsektor Perikanan, diagram timbang dibangun dari Kegiatan Penangkapan Ikan maupun Kegiatan Budidaya Ikan.

Tahun 2021 target Nilai Tukar Perikanan Budidaya 87,00 Realisasi Nilai Tukar Perikanan Budidaya sebesar 99,94 (114,87%).

Tabel 3. Capaian Nilai Tukar Perikanan Budidaya (NTPi) per Bulan Sulawesi Tengah Tahun 2021

Bulan	Indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It)	Indeks harga yang dibayarkan pembudidaya ikan (Ib)	NTPi
Januari	103,48	105,67	97,92
Februari	104,51	105,63	98,94
Maret	104,28	105,74	98,62
April	105,01	106,02	99,05
Mei	107,40	106,43	100,91
Juni	108,17	106,43	101,64
Juli	107,34	106,72	100,58
Agustus	107,13	106,90	100,22
September	106,77	106,76	100,00
Oktober	106,93	106,71	100,20
November	107,23	106,96	100,25
Desember	108,59	107,58	100,94
Rata-rata	106,40	106,46	99,94

Nilai tukar subsektor perikanan (NTPi) berfluktuasi sepanjang 2021, hal ini dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar pembudidaya (Ib). NTPi terus mengalami kenaikan sejak bulan Januari dan mencapai puncaknya pada bulan Juni. Kemudian berfluktuasi cenderung turun sampai bulan Desember namun tetap stabil di angka 100.

Banyak hal yang diduga turut andil pada fluktuatif NTPi sepanjang 2021 dimana terdapat (1) keterbatasan benih dan induk berkualitas; (2) mahalnnya harga pakan; dan (3) terbatasnya teknologi yang menyebabkan produksi rendah. Namun dengan segala permasalahan tersebut perkembangan NTP Pembudidaya pada tahun 2021 menunjukkan tren yang positif bila dibandingkan 4 (empat) tahun sebelumnya yang rata-rata berada dibawah angka 90.

Upaya yang dilakukan DKP Sulteng dalam bidang budidaya antara lain melalui pengembangan budidaya rumput laut sistem kultur

jaringan, pengembangan budidaya ikan air tawar sistem bioflok dan kolam terpal serta pemberian bantuan sarana produksi dan pendampingan bagi pelaku usaha.

❖ *IKU 4 Nilai Tukar Perikanan Tangkap (NTN)*

merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan. Juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produksi budidaya ikan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTN di atas angka 100 dapat diartikan bahwa nelayan mengalami surplus (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha melebihi pertumbuhan pengeluaran rumah tangga), NTN sama dengan 100 berarti nelayan mengalami titik impas (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha sama dengan pengeluaran rumah tangga) dan NTN di bawah 100 berarti nelayan mengalami defisit (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha di bawah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). Secara sederhana angka NTN diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani/nelayan/pembudidaya (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani/nelayan/pembudidaya (Ib). Tahun 2021 target NTN 108,76 dan terealisasi 103,27 (94,95%).

Tabel 4. Capaian NTN Sulawesi Tengah Tahun 2021

Bulan	Indeks harga yang diterima Nelayan (It)	Indeks harga yang dibayarkan Nelayan (Ib)	NTN
Januari	109,19	108,37	100,75
Februari	107,44	108,24	99,26
Maret	109,85	108,58	101,17
April	112,71	108,86	103,53
Mei	115,87	108,87	106,43
Juni	113,68	108,94	104,35
Juli	114,00	109,20	104,39
Agustus	115,00	109,41	105,10
September	114,31	109,27	104,61
Oktober	111,53	109,20	102,14
November	112,60	109,35	102,97
Desember	115,23	110,20	104,56
Rata-rata	112,62	109,04	103,27

NTN berfluktuasi sepanjang 2021, hal ini dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib). NTN cenderung stabil diangka 100 setiap bulannya dan mencapai puncak tertingginya pada bulan Mei.

Banyak hal yang diduga turut andil pada fluktuatif NTN sepanjang 2021 diantaranya (1) keterbatasan ketersediaan BBM bersubsidi pada depot SPBU dan SPDN sehingga berpengaruh pada hari operasi; (2) Kondisi cuaca yang ekstrim yang menimpa Sulawesi Tengah berpengaruh pada usaha-usaha perikanan; (3) keterbatasan es balok dan sarana perbekalan.

Menghadapi hal-hal diatas, kemudian dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya diantaranya dengan peningkatan dan

pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan provinsi sebagai sentra nelayan, peningkatan sarana produksi perikanan tangkap bagi pelaku usaha dan pola fasilitasi penyediaan BBM, es balok dan sarana perbekalan antara lain air bersih.

Capaian indikator kinerja utama 3 (tiga) dan 4 (empat) dari sasaran strategis (SS) 2 (dua) terhadap Rencana Strategis (Renstra) DKP Sulteng 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 5. Capaian IKU 3 dan 4 terhadap Renstra KP 2016-2021

Sasaran 2		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan							
		Realisasi				2021		(Renstra KP 2016-2021)	
2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian Terhadap target 2021
IKU 3				Nilai Tukar Perikanan Budidaya (NTPi) %					
85,50	85,83	87,11	100,01	87	99,94	114,87	-0,07	87	114,87
IKU 4				Nilai Tukar Perikanan Tangkap (NTN) %					
117,10	114,56	112,98	98,11	108,76	103,27	94,95	5,26	108,76	94,95

Dari tabel diatas terlihat bahwa indikator nilai tukar perikanan budidaya (%) telah mencapai/melebihi target renstra sedangkan nilai tukar perikanan tangkap (%) tidak mencapai target renstra 2016-2021. Akan tetapi sekalipun belum mencapai target, indikator nilai tukar perikanan tangkap ini sudah baik karena sudah berada diangka lebih besar dari 100, yang menandakan indeks yang diterima nelayan (It) lebih besar dari jumlah yang dibayarkan (Ib).

Tabel 6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional Sasaran 2

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional Tahun 2021*	Ket (+/-)
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya (%)	99,94	103,08	+
	Nilai Tukar Nelayan (%)	103,27	102,92	+

*Ket: *angka sementara*

Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melalui Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB) menetapkan target untuk indikator Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) sebesar 102 dan sampai dengan triwulan III tercapai 103,08 sedangkan Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) menetapkan target Nilai Tukar Nelayan 102 dan pada triwulan I tercapai 102,92. Jika dibandingkan dengan capaian nasional maka untuk capaian NTN sudah baik karena sudah melebihi capaian nasional sedangkan capaian NTPi masih lebih rendah dari target dan lebih rendah dari angka 100 yakni 99,94. Hal ini berarti indeks yang diterima It) pembudidaya Sulteng lebih kecil dari yang dibayarkan (Ib).

Dalam pencapaian sasaran Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan didukung oleh 2 (dua) program yakni program pengelolaan perikanan budidaya dan program pengelolaan

perikanan tangkap. Capaian kinerja sasaran ini sebesar sebesar 104,91% dan capaian realisasi anggaran 85,21%.

Tabel 7. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran 2 Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian Anggaran Tahun 2021 (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat KP	Nilai Tukar Pembudidaya	114,87	92,96	1,24
	Nilai Tukar Nelayan	94,95	82,87	1,15
	TOTAL	104,91	87,92	1,19

Pencapaian sasaran strategis Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sebesar 104,91 dan persentase penyerapan anggaran sebesar 87,92. Efisiensi sebesar 1,19 yang artinya efisiensi anggaran untuk sasaran ini sudah baik.

Sasaran 3 Terwujudnya ketahanan pangan bidang kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah

❖ IKU 5 Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan necara permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS. Nilai AKI diperoleh berdasarkan penghitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI) menggunakan 4 (empat) kelompok jenis ikan dan udang segar/basah, kelompok ikan dan udang awetan dan kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar, dll) dan kelompok bumbu-bumbuan. Untuk kelompok ikan dan udang awetan, kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar, dll) dan kelompok bumbu-bumbuan dikonversi ke dalam bentuk ikan setara segar.

Target Angka Konsumsi Ikan yang ingin dicapai pada tahun 2021 adalah sebesar 53,83 Kg/kap/th dan terealisasi sebesar 67,04 Kg/Kap/Th* atau 124,54%. Capaian ini diperkirakan masih akan naik dengan selesainya proses penghitungan AKI Nasional pada awal semester II. Bila dilihat capaian ini lebih tinggi daripada target AKI Nasional yaitu sebesar 58,08 Kg/Kap/Th. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan ini salah satunya merupakan dampak dari publisitas produk perikanan kelautan dan kampanye gemar makan ikan disamping imbas dari Sulawesi Tengah yang merupakan daerah pesisir dimana ikan merupakan salah satu komoditas utama.

Kebutuhan terbesar ikan konsumsi rumah tangga selama tahun 2021 antara lain ikan tongkol/tuna/cakalang, selar, ekor kuning, kembung, cumi-cumi/sotong/gurita, udang/lobster, teri, bandeng, nila, mujair.

Capaian indikator kinerja utama 5 (lima) dari sasaran strategis (SS) 3 (tiga) terhadap Rencana Strategis (Renstra) DKP Sulteng 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 8. Capaian IKU 5 terhadap Renstra KP 2016-2021

Terwujudnya ketahanan pangan dibidang kelanjutan dan perikanan di Sulawesi Tengah									
SS3				(Renstra KP 2016-2021)					
Realisasi				2021		%			
2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan 2020-2021	Target 2021	%Capaian Terhadap target 2021
IKU 5				Jumlah konsumsi makan ikan (kg/kap/th)					
52,34	56,65	57,54	57,83	53,83	67,04	124,54	15,93	53,83	124,54

Dari tabel diatas terlihat bahwa indikator jumlah konsumsi makan ikan (kg/kap/th) telah mencapai/melebihi target renstra 2016-2021 yakni 124,54%. Capaian konsumsi makan ikan tahun 2021 juga meningkat 15,93% dari tahun sebelumnya.

Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional Sasaran 3

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional Tahun 2021	Ket (+/-)
Terwujudnya ketahanan pangan dibidang KP di Sulawesi Tengah	Jumlah konsumsi makan ikan (kg/kap/th)	67,04	55,16	+

Ket:

Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melalui Ditjen Penguatan Daya Saing (DJPDS) menetapkan target nasional untuk indikator konsumsi makan ikan (Kg/Kap/Th) sebesar 58,08 dan tercapai 55,16 sedangkan target Sulteng 53,83 dan tercapai 67,04 Kg/Kap/th. Jika dibandingkan dengan capaian nasional maka capaian konsumsi makan ikan Sulteng sudah melebihi target daerah maupun target nasional. Ini menunjukkan keberhasilan urusan kelautan dan perikanan Sulteng dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan angka konsumsi ikan antara lain kegiatan gemar makan ikan yang rutin diadakan setiap tahunnya.

Tabel 10 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 3 Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)
Terwujudnya ketahanan pangan dibidang KP di Sulawesi Tengah	Jumlah konsumsi makan ikan (kg/kap/th)	5.502.517.958	5.323.322.494	96,74

Dalam upaya pencapaian sasaran terwujudnya ketahanan pangan dibidang kelanjutan dan perikanan di Sulawesi Tengah, maka didukung dengan anggaran Rp5.502.517.958,- dan teralisasi Rp.5.323.322.494,- atau sebesar 96,74%.

Tabel 11. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 3 T.2021

Sasaran/ Program	Indikator	Target	Kinerja Realisasi	Capaian	Target	Anggaran Realisasi	Capaian
Terwujudnya ketahanan pangan dibidang kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah							
Program P2HP	Jumlah konsumsi makan ikan (kg/kap/th)	53,83	67,04	124,54	5.502.517.958	5.323.322.494	96,74

Dalam pencapaian sasaran Terwujudnya ketahanan pangan dibidang kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah didukung oleh 1 (satu) program yakni Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Capaian kinerja sasaran ini sebesar sebesar 124,54% dan capaian realisasi anggaran 96,74%.

Tabel 12. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran 3 Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja T.2021 (%)	Capaian Anggaran T.2021 (%)	% Tingkat Efisiensi
Terwujudnya ketahanan pangan dibidang kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah	Jumlah konsumsi makan ikan (kg/kap/th)	124,54	96,74	1,28

Pencapaian sasaran strategis Terwujudnya ketahanan pangan dibidang kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah sebesar 124,54 dan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,74. Efisiensi sebesar 1,28 yang artinya efisiensi pengelolaan anggaran untuk sasaran ini sudah baik.

Sasaran 4 Terwujudnya pengelolaan dan peningkatan produksi kelautan dan perikanan

❖ *IKU 6 Nilai Ekspor Hasil Perikanan*

target yang ditetapkan Sulawesi Tengah pada 2021 adalah US\$3.784.000 dan terealisasi US\$ 1.132.001,29 atau 29,91%. Nilai capaian ini sangat rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Rendahnya capaian ini disebabkan karena pada masa pandemi covid-19 ini proses aktifitas banyak berkurang. Selama tahun 2021 jenis komoditi perikanan yang diekspor dari Sulawesi Tengah antara lain: Gurita beku, fillet ikan beku dan sotong beku, dengan negara tujuan Reunion, Vietnam, USA, Japan, Malta, Korea Selatan, Hongkong dan Singapore. Komoditas dan nilai ekspor hasil perikanan tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Nilai Ekspor Hasil Perikanan

No	Komoditas	Volume	Nilai Ekspor (USD)
1	Gurita Beku	201.025,83 kg	1.016.152,35
2	Fillet Ikan beku	14.588,60 kg	81.162,92
3	Sotong Beku	2.410,00 kg	7.160,81
4	Kerapu Hidup	917 ekor	20.941,13
5	Kerang Darah	534 kg	298,60
6	Kepiting Bakau	3.397 ekor	6.285,48
T O T A L			1.132.001,29

❖ *IKU 7 Jumlah produksi perikanan budidaya*

Perikanan budidaya meliputi budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya karamba dan budidaya sawah. Komoditi unggulan perikanan budidaya Sulawesi Tengah adalah rumput laut dan ikan air tawar (nila, mas dan lele). Dominasi produksi yang cukup besar terdapat pada pengembangan komoditi rumput laut, yaitu *Euchema Cottoni* yang banyak diusahakan pada budidaya laut dan *Glacillaria sp* yang diusahakan pada budidaya tambak.

Target produksi budidaya pada tahun 2021 adalah sebesar 1.221.858 ton dengan capaian adalah 731.966,58 ton atau 59,91%. Capaian produksi tahun 2021 lebih rendah dari target yang ditetapkan selain disebabkan karena keterbatasan dalam penerapan teknologi, rata-rata pembudidaya masih menggunakan teknologi tradisional dengan keterbatasan sarana produksi dan faktor cuaca serta lingkungan yang sangat berperan besar, juga disebabkan oleh turunnya produksi rumput laut. Berdasarkan data sementara produksi perikanan budidaya terbesar berasal dari Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 569.925 ton dan disusul oleh Kabupaten Morowali sebesar 71.600,67 ton. Data produksi sementara budidaya tahun 2021 per kabupaten kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021 Per Kab/Kota

No	Kabupaten/Kota	Produksi
1	Banggai Kepulauan	569.925,00
2	Banggai Laut	28.831,5
3	Banggai	4.328,43
4	Morowali	71.600,67
5	Morowali Utara	2.446,43
6	Poso	3.777,81
7	Donggala	20.344,00
8	Toli-toli	591,02
9	Buol	227,69
10	Parigi Moutong	26.510,74
11	Tojo Una Una	2.643,03
12	Kota Palu	123,6
13	Sigi	616,67
T o t a l		731.966,58

❖ *IKU 8 Jumlah produksi perikanan tangkap*

Perikanan tangkap meliputi perikanan laut dan perairan umum daratan (PUD). Target produksi perikanan tangkap di Sulawesi Tengah pada tahun 2021 adalah 251.686 ton dan terealisasi sebesar 207.940,5 ton atau sebesar 82,62%. Nilai ini lebih rendah dari target yang ditetapkan. Faktor cuaca dan keterbatasan sarana dan teknologi dalam penangkapan menjadi beberapa penyebab dalam pencapaian

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN | 2023

produksi perikanan tangkap. Meskipun capaian tahun 2021 tidak mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi capaian ini meningkat 17,25% dari capaian tahun 2020 yang mencapai 177.352,80 ton.

Data produksi tangkap tahun 2021 per kabupaten kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021 Per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Produksi
1	Banggai Kepulauan	10.223,50
2	Banggai	22.657,9
3	Morowali	33.086,90
4	Poso	8.382,8
5	Donggala	25.184,40
6	Toli-toli	18.436,8
7	Buol	22.397,6
8	Parigi Moutong	20.814,8
9	Tojo Una Una	13.430,5
10	Morowali Utara	2.446,6
11	Banggai Laut	29.609,2
12	Palu	1.119,3
13	Sigi	150,2
	T o t a l	207.940,5

Capaian indikator kinerja utama 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dari sasaran strategis (SS) 4 (empat) terhadap Rencana Strategis (Renstra) DKP Sulteng 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 16. Capaian IKU 6, 7 dan 8 terhadap Renstra KP 2016-2021

Sasaran 4				Terwujudnya pengelolaan dan peningkatan produksi kelautan dan perikanan					
Realisasi				2021		(Renstra KP 2016-2021)			
2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd target 2021
IKU 6				Nilai Ekspor hasil perikanan (USD)					
3.227.835,5	3.630.475,1	3.763.124,0	1.645.932,2	3.784.000	1.132.001,2	29,92	-31,22	3.784.000	29,92
1	9	2	5	0	9			0	
IKU 7				Jumlah hasil produksi budidaya (ton)					
1.059.050,3	918.186,64	966.953,01	960.460,28	1.221.858	730.246,79	59,77	-22,38	1.221.858	59,77
IKU 8				Jumlah hasil produksi tangkap (ton)					
174.964	171.115	196.519,3	177.352,8	251.686	207.940,5	82,62	17,25	251.686	82,62

Dari tabel diatas terlihat bahwa indikator nilai ekspor hasil perikanan (USD) tidak mencapai target renstra 2016-2021 yakni 29,92%. Nilai ekspor tidak tercapai karena ada pembatasan kegiatan perikanan yang disebabkan oleh Covid-19. Capaian nilai ekspor hasil perikanan tahun 2021 juga menurun 31,22% dari tahun sebelumnya.

Untuk indikator jumlah hasil produksi budidaya (ton) juga tidak mencapai target renstra 2016-2021 yakni 59,77%. Indikator ini tidak tercapai disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya karena adanya penurunan produksi rumput laut yang disebabkan oleh beralihnya

pembudidaya rumput laut di Kabupaten Morowali ke usaha sawit atau pertambangan. Capaian produksi budidaya menurun 22,38% dari tahun 2020.

Untuk indikator jumlah hasil produksi perikanan tangkap (ton) tidak mencapai target renstra 2016-2021 yakni 82,62% akan tetapi capaian ini meningkat 17,25% dari tahun sebelumnya.

Tabel 17. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional Sasaran 4

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional Tahun 2021*	Ket (+/-)
Terwujudnya pengelolaan dan peningkatan produksi KP	Nilai Ekspor hasil perikanan (USD)	1.132.001,29	1.260.000.000	+
	Jumlah hasil produksi budidaya (Ton)	731.966,59	12.250.000	-
	Jumlah hasil produksi tangkap (Ton)	207.940,5	1.980.000	+

Ket: *angka sementara

Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menetapkan target ekspor USD 6,05 Milyar dan teralisasi USD 1,26 Milyar. Target produksi perikanan budidaya 19,47 juta ton dan terealisasi 12,25 juta ton. Target produksi perikanan tangkap 8,08 juta ton dan terealisasi 1,98 juta ton. Untuk nilai ekspor, target Sulteng adalah sebesar USD3.784.000 atau 0,06% dari target nasional sedangkan untuk realisasi nilai ekspor Sulteng USD 1.132.001,29 atau sebesar 0,09% dari capaian nasional. Target produksi budidaya Sulteng adalah sebesar 1.221.858 ton atau sebesar 6,28% dari target nasional dan terealisasi 731.966,59 ton atau sebesar 7,42% dari capaian nasional. Target produksi tangkap Sulteng adalah sebesar 251.686 ton atau sebesar 3,11% dari target nasional dan terealisasi 165.508,60 ton atau sebesar 8,36% dari capaian nasional.

Tabel 18. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 4 Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
Terwujudnya pengelolaan dan peningkatan produksi kelautan dan perikanan	Nilai Ekspor hasil perikanan	5.502.517.958	5.323.322.494	96,74
	Jumlah hasil produksi budidaya	6.801.827.683	6.363.062.235	93,55
	Jumlah hasil produksi tangkap	16.415.870.434	13.882.195.318	84,57
T O T A L		28.720.216.075	25.568.580.047	89,03

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN | 2023

Dalam upaya pencapaian sasaran pengelolaan dan peningkatan produksi kelautan dan perikanan, maka didukung dengan anggaran Rp28.720.216.075,- dan teralisasi Rp25.568.580.047,- atau sebesar 89,03%.

Tabel 19. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 4 T.2021

Sasaran/Program	Indikator	Target	Kinerja Realisasi	Capaian	Target	Anggaran Realisasi	Capaian
Terwujudnya pengelolaan dan peningkatan produksi kelautan dan perikanan							
Program P2HP	Nilai Ekspor hasil perikanan	3.784.000	1.132.001,29	29,92	5.502.517.958	5.323.322.494	96,74
Program Pengelolaan Perikanan budidaya	Jumlah hasil produksi budidaya	1.221.858	731.966,59	59,91	6.801.827.683	6.363.062.235	93,55
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah hasil produksi tangkap	251.686	207.940,5	82,62	16.415.870.434	13.882.195.318	84,57
T O T A L				57,44	28.720.216.075	25.568.580.047	91,62

Dalam pencapaian sasaran Terwujudnya pengelolaan dan peningkatan produksi kelautan dan perikanan didukung oleh 3 (tiga) program yakni program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, program pengelolaan perikanan budidaya dan program pengelolaan perikanan tangkap. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 57,44% dan capaian realisasi anggaran 91,62%.

Tabel 20. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran 4 Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian Anggaran Tahun 2021 (%)	% Tingkat Efisiensi
Terwujudnya pengelolaan & peningkatan produksi KP	Nilai Ekspor hasil perikanan	29,92	96,74	0,31
	Jumlah hasil produksi budidaya	59,91	93,55	0,64
	Jumlah hasil produksi tangkap	65,76	84,57	0,78
T O T A L		51,86	91,62	0,56

Pencapaian sasaran strategis terwujudnya pengelolaan dan peningkatan produksi kelautan dan perikanan sebesar 51,86 dan persentase penyerapan anggaran sebesar 91,62. Efisiensi sebesar 0,56 yang artinya efisiensi pengelolaan anggaran untuk sasaran masih kurang baik.

Sasaran Strategis 5 Tersedianya Teknologi Berkelanjutan untuk Peningkatan dan Pengelolaan Produksi

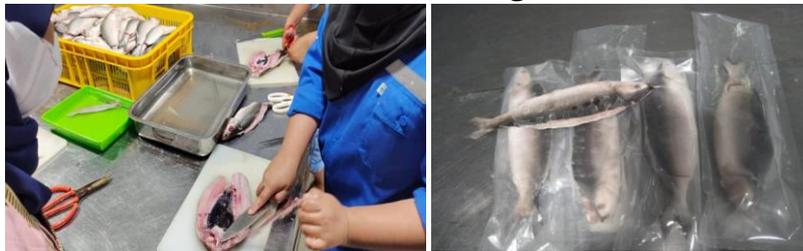
- ❖ *IKU 9 Jumlah Inovasi Kelautan dan Perikanan yang diterapkan (buah)*
Tahun 2020 target inovasi yang dikembangkan adalah 4 buah dan terealisasi 4 buah. Inovasi-inovasi yang dikembangkan selama 2020 adalah:

a. **Bandeng bebas duri (BABERI)**

Sebagai ikan komoditas pangan, bandeng menempati urutan pertama dalam pemenuhan omega 3 sebesar 14,20% diatas Sarden, Salmon dan Tuna. Energi yang dihasilkan Bandeng adalah sebesar 129 kkal, protein sebesar 20 gr, lemak 4,8 gr, kalsium 20 mg, fosfor 150 mg, zat besi 2 mg serta mengandung vitamin A dan B1.

Bandeng bebas duri merupakan salah satu diversifikasi produk olahan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Produk ini cukup diminati yang dapat dilihat dari permintaan pasar yang besar terutama pada bandeng dengan ukuran 500-600 gram perekornya. Proses pengolahan bandeng bebas duri tidak hanya dilakukan oleh karyawan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi tengah, namun juga ditularkan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pelatihan.

Gambar 1. Bandeng Bebas Duri



b. **Pengembangan Rumput Laut Sistem Kultur Jaringan**

Sistem kultur jaringan merupakan salah satu solusi dalam menyediakan bibit rumput laut berkualitas. Inovasi ini telah dimulai sejak tahun 2018 melalui MoU dengan BIOTROP, pelatihan aparatur serta ujicoba pengembangan RL bibit kultur jaringan.

Gambar 2. Pengembangan rumput Laut Sistem Kultur Jaringan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng



c. **Kolam Percontohan Budidaya Udang Vaname Skala Rakyat (Kolam Terpal Bulat Diameter 10 Meter)**

Budidaya udang vaname skala rakyat mulai dikembangkan pada Tahun 2021. Konstruksi yang digunakan adalah terpal dengan diameter 10 m dan tinggi 2 m. Padat tebar 300 ekor per m3 dan padat tebar per kolamnya 35.000 ekor. Produksi sekali panen 650 kilogram per kolam dengan masa budidaya 4 bulan. Investasi untuk pembuatan kolam ini 43 juta per kolamnya.

Keunggulan menerapkan sistem budidaya ini adalah konstruksi lebih mudah didapat, tidak memerlukan lahan luas, biaya investasi dan operasional kecil dan pengontrolan mudah.



Gambar 3. Budidaya Udang Vaname Kolam Bundar Skala Rakyat

d. **Budidaya Sistem Bioflok**

Bioflok berasal dari kata “*Bios*” artinya kehidupan dan “*Floc* atau *Flock*” artinya gumpalan. Bioflok bias diartikan sebagai kumpulan dari berbagai campuran heterogen mikroba (plankton, protozoa, fungi), partikel, polimenorganik, koloid dan kaiton yang saling berinteraksi dengan sangat baik di dalam air yang tergabung dalam gumpalan (flok). Teknologi bioflok adalah teknik manajemen kualitas air yang didasarkan padapertumbuhan dan pengendalian bakteri Heterotrof di dalam sistem budidaya dengan *zero water exchange* (sistem pemeliharaan tanpa adanya pergantian air).

Penerapan sistem bioflok dalam budidaya ikan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan budidaya ikan sistem konvensional diantaranya: (1) Mengurangi beban limbah yang berada padamedia budidaya, (2) Hemat air (Efisiensi penggunaan Air), (3) Padat tebar tinggi hingga 250 ekor/m³ pada Ikan Nila, (4) Produktivitas tinggi, (5) Meningkatkan efisiensi pakan/ *Food Conversion Ratio* (FCR) hingga 0.7–0.9, (6) Pemanfaatan lahan lebih efisien (pemanfaatan lahan sempit), (7) Produksi dan hasil limbah yang lebih sedikit dan (8) Ramah lingkungan.



Gambar 4. Kolam Sistem Bioflok

Capaian indikator kinerja utama 9 (sembilan) dari sasaran strategis (SS) 5 (lima) terhadap Rencana Strategis (Renstra) DKP Sulteng 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah.

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2023

Tabel 21. Capaian IKU 9 terhadap Renstra KP 2016-2021

Sasaran 5 Tersedianya teknologi berkelanjutan untuk peningkatan dan pengelolaan produksi									
Realisasi				2021			(Renstra KP 2016-2021)		
2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian Terhadap target 2021
IKU 9 Jumlah inovasi kelautan dan perikanan yang diterapkan (buah)									
4	4	4	4	4	4	100	-	4	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa indikator Jumlah inovasi kelautan dan perikanan yang diterapkan (buah) telah mencapai target renstra 2016-2021 yakni 100%. Capaian ini juga sama dengan capaian tahun sebelumnya yang juga mencapai 100%.

Tabel 22. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional Sasaran 5

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional Tahun 2021*	Ket (+/-)
Tersedianya teknologi berkelanjutan untuk peningkatan dan pengelolaan produksi	Jumlah inovasi kelautan dan perikanan yang diterapkan (buah)	4	-	-

Pengukuran jumlah inovasi kelautan dan perikanan yang diterapkan tidak dilaksanakan oleh Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) RI sehingga realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan realisasi nasional.

Tabel 23. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 5 Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
Tersedianya teknologi berkelanjutan untuk peningkatan dan pengelolaan produksi	Jumlah inovasi KP yang diterapkan (buah)	3.084.079.511	2.956.758.372	95,87

Dalam upaya pencapaian sasaran tersedianya teknologi berkelanjutan untuk peningkatan dan pengelolaan produksi, maka didukung dengan anggaran Rp3.084.079.511,- dan teralisasi Rp2.956.758.372,- atau sebesar 95,87%.

Tabel 24. Pencapaian Kinerja & Anggaran Sasaran Strategis 5 Tahun 2021

Sasaran/Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya teknologi berkelanjutan untuk peningkatan dan pengelolaan produksi							
Program P2HP	Jumlah inovasi KP yang diterapkan (buah)	4	4	100	718.748.935	717.988.272	99,89
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					2.365.330.576	2.238.770.100	94,65
TOTAL		4	4	100	3.084.079.511	2.956.758.372	96,77

Dalam pencapaian sasaran Tersedianya teknologi berkelanjutan untuk peningkatan dan pengelolaan produksi didukung oleh 2 (dua) program yakni program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan program pengelolaan perikanan budidaya. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 100% dan capaian realisasi anggaran 96,77%.

Tabel 25. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran 5 Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian Anggaran Tahun 2021 (%)	% Tingkat Efisiensi
Tersedianya teknologi berkelanjutan untuk peningkatan dan pengelolaan produksi	Jumlah inovasi kelautan dan perikanan yang diterapkan (buah)	100	95,87	1,04

Pencapaian sasaran Tersedianya teknologi berkelanjutan untuk peningkatan dan pengelolaan produksi sebesar 100 dan persentase penyerapan anggaran sebesar 95,87. Efisiensi sebesar 1,04 yang artinya efisiensi pengelolaan anggaran untuk sasaran ini sudah baik.

Sasaran Strategis 6 Tersedianya Infrastruktur untuk Peningkatan dan Pengelolaan Produksi

❖ IKU 10 Jumlah Sentra Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Infrastrukturnya (unit/sentra)

Tahun 2021 target peningkatan sentra kelautan dan perikanan adalah 4 sentra/unit dan terealisasi 5 sentra/unit atau sebesar 125%. Sentra kelautan perikanan yang ditingkatkan infrastrukturnya tahun 2021 adalah:

a. Pembangunan PPI Mato

Pengembangan PPI Mato di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2021 meliputi pembangunan turap dan pembangunan pabrik es 10 ton beserta pembangunan tower air pabrik es.



Gambar 5. Pembangunan Turap dan Pabrik es 10 ton di PPI Mato

b. Pengembangan PPI Paranggi Kabupaten Parigi Moutong

Tahun 2021 dilakukan pengembangan pada PPI Paranggi Kabupaten Parigi Moutong yakni pembangunan mess karyawan yang merupakan fasilitas penunjang dalam mendukung usaha perikanan tangkap di wilayah PPI Paranggi. Selain itu juga dilakukan *landclearing* PPI Paranggi.



Gambar 6. Pengembangan PPI Paranggi Kabupaten Parigi Moutong

c. Unit Pembenihan Instalasi Mamboro

Pada tahun 2021 dilakukan pengembangan pada unit pembenihan instalasi Mamboro melalui pembangunan kolam dan landclearing Instalasi Mamboro.



Gambar 7. Pengembangan Instalasi Mamboro

d. Unit Pembenihan Tindaki

Pada tahun 2021 dilakukan pengembangan pada unit pembenihan Tindaki melalui pembangunan gedung pakan yang bertujuan untuk mendukung ketersediaan pakan.



Gambar 8. Pengembangan Unit Pembenihan Tindaki

e. Kantor Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan di kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil maka pada tahun 2021 dilakukan pembangunan kantor pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Buol.



Gambar 9. Kantor Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Buol

Capaian indikator kinerja utama 10 (sepuluh) dari sasaran strategis (SS) 6 (enam) terhadap Rencana Strategis (Renstra) DKP Sulteng 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 26. Capaian IKU 10 terhadap Renstra KP 2016-2021

SS6				Tersedianya infrastruktur untuk peningkatan dan pengelolaan produksi (Renstra KP 2016-2021)						
Realisasi				2021						
2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian Terhadap target 2021	
IKU 10				Jumlah sentra kelautan dan perikanan yang ditingkatkan infrastrukturnya (unit/sentra)						
4	4	5	3	4	5	125	66,67	4	125	

Dari tabel diatas terlihat bahwa indikator Jumlah sentra kelautan dan perikanan yang ditingkatkan infrastrukturnya (unit/sentra) telah mencapai/melebihi target renstra 2016-2021 yakni 125%. Capaian ini meningkat 66,67% dari capaian tahun sebelumnya.

Tabel 27. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional Sasaran 6

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional Tahun 2021*	Ket (+/-)
Tersedianya infrastruktur untuk peningkatan dan pengelolaan produksi	Jumlah sentra kelautan dan perikanan yang ditingkatkan infrastrukturnya (unit/sentra)	5	-	-

Pengukuran jumlah sentra kelautan dan perikanan yang ditingkatkan infrastrukturnya tidak dilaksanakan oleh Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) RI sehingga realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan realisasi nasional.

Tabel 28. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 6 Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
Tersedianya infrastruktur untuk peningkatan dan pengelolaan produksi	Jumlah sentra kelautan dan perikanan yang ditingkatkan infrastrukturnya (unit/sentra)	24.632.109.145	21.623.738.997	87,79

Dalam upaya pencapaian sasaran tersedianya infrastruktur untuk peningkatan dan pengelolaan produksi, maka didukung dengan anggaran Rp24.632.109.145,- dan terealisasi Rp21.623.738.997,- atau sebesar 87,79%.

Tabel 29. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 6 Tahun 2021

Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya infrastruktur untuk peningkatan dan pengelolaan produksi							
Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah sentra kelautan dan perikanan yang ditingkatkan			125	5.502.517.958	5.323.322.494	96,74
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	infrastrukturnya (unit/sentra)	4	5		4.436.497.107	4.124.292.135	92,96
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					14.693.094.080	12.176.124.368	82,87
TOTAL		4	5	125	24.632.109.145	21.623.738.997	87,79

Dalam pencapaian sasaran Tersedianya infrastruktur untuk peningkatan dan pengelolaan produksi didukung oleh 3 (tiga) program yakni program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, program pengelolaan perikanan budidaya dan program pengelolaan perikanan tangkap. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 125% dan capaian realisasi anggaran 87,79%.

Tabel 30. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran 6 Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	% Tingkat Efisiensi
		Tahun 2021 (%)	Tahun 2021 (%)	
Tersedianya infrastruktur untuk peningkatan dan pengelolaan produksi	Jumlah sentra kelautan dan perikanan yang ditingkatkan infrastrukturnya (unit/sentra)	125	87,79	1,42

Pencapaian sasaran Tersedianya infrastruktur untuk peningkatan dan pengelolaan produksi sebesar 125 dan persentase penyerapan anggaran sebesar 87,79. Efisiensi sebesar 1,42 yang artinya efisiensi pengelolaan anggaran untuk sasaran ini sudah baik.

Sasaran 7 Terselenggaranya Kemudahan Akses Pembiayaan dan Pemasaran Pelaku Usaha

❖ *IKU 11 Nilai Pembiayaan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan dari Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank*

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang termasuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dimana yang terlibat didalamnya adalah pemerintah, lembaga penjamin dan perbankan sebagai penerima jaminan yang berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan koperasi. Tahun 2021 target pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan adalah Rp.120.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 857.997.512.425,- (Bank Indonesia) atau sebesar 715,00%. Realisasi KUR subsektor kelautan dan perikanan Sulawesi Tengah pada semester I tahun 2021 sebesar 348,07 Milyar meningkat 16,84% dari semester I tahun 2020 yang berjumlah 297,9 Milyar dan semester II 509,9 M meningkat 61,51% dari capaian semester II Tahun 2020 yang

berjumlah 315,7 M. Nilai KUR subsektor kelautan dan perikanan Sulawesi Tengah semester I dan II sekitar 25,059% dari rata-rata nasional yang persemesternya mencapai +/- 1,71 T.

Masalah yang sering dihadapi oleh pelaku usaha perikanan dalam pengajuan KUR diantaranya adalah prasarat yang masih sulit untuk dipenuhi diantaranya ketersediaan agunan (jaminan) dalam setiap transaksi. Salah satu bentuk dukungan kepada pelaku usaha antara lain adalah melalui fasilitasi program SeHAT (Sertifikasi Hak Atas Tanah) yang diharapkan dapat digunakan sebagai agunan dalam pengajuan kredit, baik sebagai modal usaha maupun investasi, peningkatan kelembagaan pelaku usaha serta pendampingan dan dukungan saprodi bagi pelaku usaha.

Capaian indikator kinerja utama 11 (sebelas) dari sasaran strategis (SS) 7 (tujuh) terhadap Rencana Strategis (Renstra) DKP Sulteng 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 31. Capaian IKU 11 terhadap Renstra KP 2016-2021

Sasaran 7				Terselenggaranya kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran						
Realisasi				2021 (Renstra KP 2016-2021)						
2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd target 2021	
IKU 11				Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp. Juta)						
117.159.300	143.918.843,11	1.462.459,46	613.691,06	120.000	857.997,51	715	39,81	120.000	715	

Dari tabel diatas terlihat bahwa indikator Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp. Juta) telah mencapai/melebihi target renstra 2016-2021 yakni 715%. Capaian ini meningkat 39,81% dari capaian tahun sebelumnya.

Tabel 32. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional Sasaran 7

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional Tahun 2021*	Ket (+/-)
Terselenggaranya kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran	Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp. Juta)	857.997,51	1.970.000	+

Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menetapkan target Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank sebesar 3,30 Trilyun dan terealisasi sementara 1,97 Trilyun. Target Sulteng sebesar 120 Milyar rupiah atau sebesar 3,64% dari target nasional dan terealisasi 857,99 Milyar atau sebesar 43,55% dari capaian nasional.

Tabel 33. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 7 Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
Terselenggaranya kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran	Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp. Juta)	5.502.517.958	5.323.322.494	96,74

Dalam upaya pencapaian sasaran Terselenggaranya kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran, maka didukung dengan anggaran Rp5.502.517.958,- dan teralisasi Rp5.323.322.494,- atau sebesar 96,74%.

Tabel 34. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 7 Tahun 2021

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	
Terselenggaranya kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran	Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp. Juta)	120.000	857.997,51	715	5.502.517.958	5.323.322.494	96,74

Dalam pencapaian sasaran Terselenggaranya kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran didukung oleh program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 715% dan capaian realisasi anggaran 96,74%.

Tabel 35. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran 7 Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian Anggaran Tahun 2021 (%)	% Tingkat Efisiensi
Terselenggaranya kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran	Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp. Juta)	715	96,74	7,39

Pencapaian sasaran Terselenggaranya kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran sebesar 715 dan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,74. Efisiensi sebesar 7,39 yang artinya efisiensi pengelolaan anggaran untuk sasaran ini sudah sangat baik.

Sasaran 8 Terwujudnya peningkatan konservasi kelautan dan perikanan

❖ *IKU 12 Luas Kawasan Konservasi*

Pengembangan kawasan konservasi perairan daerah merupakan salah satu amanat UU No. 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau

dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Berdasarkan KEPMEN-KP NO. 50 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Donggala, Buol, Tolitoli, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah, KEPMEN-KP NO. 51 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, KEPMEN-KP NO. 52 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali, Morowali Utara, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, KEPMEN-KP NO. 53 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, status kawasan konservasi Sulawesi Tengah seluas 1.338.291,55 Ha. Data ini merupakan hasil dari konsultasi publik dan penyamaan data dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP-RI) Tahun 2019. Data kawasan konservasi perairan di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 36. Kawasan Konservasi Perairan di Sulawesi Tengah

No.	KKP3K	Kabupaten	Luas (ha)
1.	DOBOTO	Donggala	942,34
		Toli-toli	55.780,08
		Buol	3.320,30
		<i>LUAS KAWASAN</i>	<i>60.042,72</i>
2.	TOMINI	Parigi Moutong	121.193,59
		Poso	82,87
		Tojo Una-Una	7.413,40
		<i>LUAS KAWASAN</i>	<i>128.689,87</i>
3.	DALAKA	Banggai	109.753,93
		Banggai Kepulauan	138.773,94
		Banggai Laut	608.120,99
		<i>LUAS KAWASAN</i>	<i>856.648,86</i>
4.	MOROWALI	Morowali	252.127,03
		Morowali Utara	40.783,07
		<i>LUAS KAWASAN</i>	<i>292.910,10</i>
		LUAS TOTAL	1.338.291,55

Target luas kawasan konservasi tahun 2021 sebesar 1.200.000 Ha dan teralisasi 1.338.291,55 Ha sesuai dengan data pada tabel diatas.

Capaian indikator kinerja utama 12 (dua belas) dari sasaran strategis (SS) 8 (delapan) terhadap Rencana Strategis (Renstra) DKP Sulteng 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 37. Capaian IKU 12 terhadap Renstra KP 2016-2021

Sasaran 8				Terwujudnya peningkatan konservasi kelautan dan perikanan						
Realisasi				2021			(Renstra KP 2016-2021)			
2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian Terhadap target 2021	
IKU 12				Luas kawasan konservasi (Ha)						
1.379.159,79	1.379.159,79	1.338.291,55	1.338.291,55	1.200.000	1.338.291,55	111,52	-	1.200.000	111,52	

Dari tabel diatas terlihat bahwa indikator luas kawasan konservasi (Ha) telah mencapai/melebihi target renstra 2016-2021 yakni 111,52%. Capaian ini sama dengan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 38. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional Sasaran 8

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional Tahun 2021*	Ket (+/-)
Terwujudnya peningkatan konservasi kelautan dan perikanan	Luas kawasan konservasi (Ha)	1.338.291,55	28.400.000	+

Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menetapkan target Luas kawasan konservasi sebesar 24,1 Juta Ha dan teralisasi sementara 28,4 Juta Ha. Target Sulteng sebesar 1,2 Juta Ha atau sebesar 4,98% dari target nasional dan teralisasi 1,34 Juta Ha atau sebesar 4,71% dari capaian nasional.

Tabel 39. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 8 Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
Terwujudnya peningkatan konservasi KP	Luas kawasan konservasi (Ha)	4.413.569.660	4.258.403.399	96,48

Dalam upaya pencapaian sasaran Terselenggaranya kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran, maka didukung dengan anggaran Rp4.413.569.660,- dan teralisasi Rp4.258.403.399,- atau sebesar 96,48%.

Tabel 40. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 8 T.2021

Sasaran / Program	Indikator	Target	Kinerja Realisasi	Capaian	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
Terwujudnya peningkatan konservasi kelautan dan perikanan	Luas kawasan konservasi (Ha)	1.200.000	1.338.291,55	111,52	4.413.569.660	4.258.403.399	96,48

Dalam pencapaian sasaran Terwujudnya peningkatan konservasi kelautan dan perikanan didukung oleh program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 111,52% dan capaian realisasi anggaran 96,48%.

Tabel 41. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran 8 Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian Anggaran Tahun 2021 (%)	% Tingkat Efisiensi
Terwujudnya peningkatan konservasi kelautan dan perikanan	Luas kawasan konservasi (Ha)	111,52	96,48	1,16

Pencapaian sasaran Terwujudnya peningkatan konservasi kelautan dan perikanan sebesar 111,52 dan persentase penyerapan anggaran

sebesar 96,48. Efisiensi sebesar 1,16 yang artinya efisiensi pengelolaan anggaran untuk sasaran ini sudah baik.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja TA. 2022

Keberhasilan tujuan dan sasaran diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tahun 2022 DKP Sulteng telah menetapkan 4 sasaran strategis (SS) dan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai, yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 42. Target dan Realisasi DKP Sulteng Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase	Kode
1	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	1. Nilai Tukar Perikanan	100	104,46	104,46	
2	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	2. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	19,14	18,22	95,19	
3	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	3. Produksi perikanan (ton)	1.491.033,02	906.023,56*	60,76*	
		4. Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	55,39	67,04	121,03	
4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	5. Jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)	200	228	114,00	

* angka sementara

Analisis capaian kinerja per sasaran strategis (SS) tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

SS 1: Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan

❖ IKU 1 Nilai tukar perikanan (NTP)

merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani perikanan. NTP diperoleh dari hasil perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) pada sektor perikanan (nelayan dan pembudidaya). NTP di atas angka 100 dapat diartikan bahwa petani perikanan mengalami surplus (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha melebihi pertumbuhan pengeluaran rumah tangga), NTP sama dengan 100 berarti petani perikanan mengalami titik impas (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha sama dengan pengeluaran rumah tangga) dan NTP di bawah 100 berarti petani perikanan mengalami defisit (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha di bawah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). Secara sederhana angka NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani/nelayan/pembudidaya (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani/nelayan/pembudidaya (Ib).

Mulai Januari 2020 dilakukan perubahan tahun dasar penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) dari tahun dasar (2012=100)

menjadi tahun dasar (2018=100) baik untuk It maupun Ib. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan indeks harga 2018=100 dibandingkan dengan indeks harga 2012=100, khususnya mengenai paket komoditas maupun diagram timbang pada masing-masing subsektor yakni Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. Pada Subsektor Perikanan, diagram timbang dibangun dari Kegiatan Penangkapan Ikan maupun Kegiatan Budidaya Ikan.

Tahun 2022 target Nilai Tukar Perikanan 100,00 dan terealisasi sebesar 104,46. Capaian ini melebihi target sebesar 104,46%.

Tabel 43. Capaian Nilai Tukar Perikanan (NTP)
Sulawesi Tengah Tahun 2022

Bulan	Indeks harga yang diterima petani perikanan (It)	Indeks harga yang dibayarkan petani perikanan (Ib)	NTP
Januari	115,19	111,46	102,75
Februari	114,95	111,59	102,75
Maret	116,11	112,10	100,69
April	117,06	113,07	102,71
Mei	115,57	113,14	104,01
Juni	116,97	114,03	103,83
Juli	115,97	114,86	105,64
Agustus	114,73	114,86	107,24
September	115,14	116,32	107,73
Oktober	115,49	116,4	106,28
November	116,93	116,17	104,19
Desember	118,09	116,72	105,66
Rata-rata	116,02	114,23	104,46

Nilai tukar perikanan (NTP) berfluktuasi sepanjang tahun 2022, hal ini dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani perikanan (It) dengan indeks harga yang dibayar petani perikanan (Ib). NTP terendah terjadi pada bulan Maret dan yang tertinggi terjadi pada bulan September. Akan tetapi NTP tetap stabil di atas 100.

Sasaran 2 Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

- ❖ IKU 2 Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Pengembangan kawasan konservasi perairan daerah merupakan salah satu amanat UU No. 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau pulau kecil dengan ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Berdasarkan KEPMEN-KP NO. 50 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Donggala, Buol, Tolitoli, dan

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2023

Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah, KEPMEN-KP NO. 51 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, KEPMEN-KP NO. 52 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali, Morowali Utara, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, KEPMEN-KP NO. 53 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, status kawasan konservasi Sulawesi Tengah seluas 1.338.291,55 Ha. Data ini merupakan hasil dari konsultasi publik dan penyamaan data dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP-RI) Tahun 2019.

Tahun 2022 target rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial adalah 19,14 dan teralisasi 18,22 atau sebesar 95,19%. Luas perairan Sulawesi Tengah sebesar 77.295,90 Km² dan luas kawasan konservasi sampai dengan tahun 2022 sebesar 14.082,92 Km². Kawasan konservasi perairan Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 44. Kawasan Konservasi Perairan di Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2022

No.	KKP3K	Kabupaten	Luas (ha)	Kegiatan
1.	DOBOTO	Donggala	1.192,34	Rehabilitasi Terumbu Karang dan Mangrove
		Toli-toli	56.250,08	Pengembangan Informasi Kawasan
		Buol	17.320,30	Sosialisasi Kawasan Konservasi dan Rehabilitasi Terumbu Karang
<i>LUAS KAWASAN</i>			<i>74.762,72</i>	
2.	TOMINI	Parigi Moutong	131.693,59	Pengembangan Informasi Kawasan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove
		Poso	282,87	Pengembangan Informasi Kawasan
		Tojo Una-Una	7.563,40	Pengembangan Informasi Kawasan
<i>LUAS KAWASAN</i>			<i>139.539,87</i>	
3.	DALAKA	Banggai	111.253,93	Pengembangan Rehabilitasi Terumbu Karang
		Banggai Kepulauan	151.273,94	Pengaturan Waktu Penangkapan Gurita di Kawasan Konservasi
		Banggai Laut	633.620,99	Pengaturan Waktu Penangkapan Gurita di Kawasan Konservasi
<i>LUAS KAWASAN</i>			<i>896.148,86</i>	
4.	MOROWALI	Morowali	257.612,03	Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Terbatas dan Sosialisasi Jenis Hewan dilindungi
		Morowali Utara	41.983,07	Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Terbatas dan Sosialisasi Jenis Hewan dilindungi
<i>LUAS KAWASAN</i>			<i>299.595,10</i>	
LUAS TOTAL			1.408.291,55	

Sasaran 3 Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing

❖ *IKU 3 Jumlah Produksi Perikanan*

Produksi perikanan merupakan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan budidaya meliputi jaring apung laut, jaring apung tawar, jaring tancap tawar, karamba, kolam, minapadi sawah, rumput laut, tambak dan budidaya laut lainnya. Produksi budidaya terbesar di dominasi oleh rumput laut, udang dan ikan air tawar (nila, mas dan lele). Perikanan tangkap meliputi perikanan laut dan perairan umum daratan (PUD). Komoditi unggulan perikanan tangkap di Sulawesi Tengah adalah ikan tongkol, tuna, cakalang (TTC) dan ikan demersal.

Tahun 2022 target produksi perikanan sebesar 1.491.033,02 ton dan terealisasi dengan angka sementara sebesar 906.023,56 ton* atau sebesar 60,76%. Capaian ini tentu saja lebih rendah dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena berkurangnya lahan budidaya rumput laut, cuaca yang kurang baik dan keterbatasan BBM bersubsidi. Data produksi perikanan ini masih merupakan angka sementara dimana menunggu selesainya validasi data sampai dengan tingkat nasional.

Produksi sementara perikanan budidaya dan perikanan tangkap tahun 2022 per kabupaten kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 45. Produksi Perikanan Tahun 2022 Per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan (Ton)*		
		Perikanan Budidaya	Perikanan Tangkap	Total
1	Banggai Kepulauan	545.677,77	10.095,75	555.773,52
2	Banggai Laut	27.604,88	29.220,23	56.825,11
3	Banggai	4.144,28	33.366,60	37.510,88
4	Morowali	68.554,45	32.647,03	101.201,48
5	Morowali Utara	2.342,35	2.421,34	4.763,69
6	Poso	3.617,08	8.269,49	11.886,57
7	Donggala	19.478,47	26.470,57	26.490,05
8	Toli-toli	565,88	16.580,02	17.145,9
9	Buol	218,00	22.099,85	22.317,85
10	Parigi Moutong	25.382,85	20.519,82	45.902,67
11	Tojo Una Una	2.530,58	13.255,80	15.786,38
12	Kota Palu	118,34	1.108,07	1.226,41
13	Sigi	590,44	143,64	734,08
	T o t a l	700.825,35	205.198,21	906.023,56

❖ *IKU 4 Angka Konsumsi Ikan (AKI)*

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan necara permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS. Nilai AKI diperoleh berdasarkan penghitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI) menggunakan 4 (empat) kelompok jenis ikan dan udang segar/basah, kelompok ikan dan udang awetan dan kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar, dll) dan kelompok bumbu-bumbuan. Untuk kelompok ikan dan udang awetan, kelompok ikan makanan jadi (goreng, bakar,

dll) dan kelompok bumbu-bumbuan dikonversi ke dalam bentuk ikan setara segar.

Target Angka Konsumsi Ikan yang ingin dicapai pada tahun 2022 adalah sebesar 55,39 Kg/kap/th dan terealisasi dengan angka sementara 67,04 Kg/Kap/Th* atau 121,03%. Capaian ini diperkirakan masih akan naik dengan selesainya proses penghitungan AKI Nasional pada awal semester II. Bila dilihat capaian ini lebih tinggi daripada target AKI Nasional yaitu sebesar 56,48 Kg/Kap/Th. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan ini salah satunya merupakan dampak dari publisitas produk perikanan kelautan dan kampanye gemar makan ikan disamping imbas dari Sulawesi Tengah yang merupakan daerah pesisir dimana ikan merupakan salah satu komoditas utama.

Kebutuhan terbesar ikan konsumsi rumah tangga selama tahun 2022 antara lain ikan tongkol/tuna/cakalang, selar, ekor kuning, kembung, cumi-cumi/sotong/gurita, udang/lobster, teri, bandeng, nila, mujair.

Sasaran Strategis 4 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta Regulasi-Deregulasi terkait Pengelolaan SDKP

❖ *IKU 5 Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari operasi)*

Dalam menjaga kedaulatan wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan didukung oleh beberapa hal antara lain SDM pengawas, armada pengawasan dan lain sebagainya. Tahun 2022 target hari operasi pengawasan SDKP adalah 200 hari dan terealisasi 228 hari.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelum

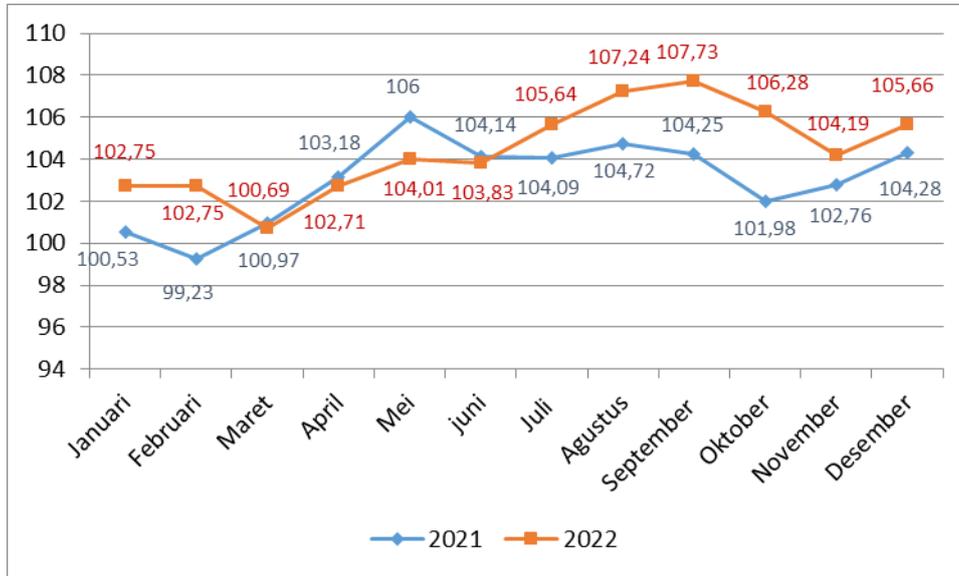
Tahun 2022 merupakan tahun awal Renstra 2021-2026. Capaian tahun 2022 ini akan dibandingkan dengan tahun akhir periode Renstra 2016-2021. Perbandingan capaian IKU Dinas tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 46. Perbandingan Capaian IKU tahun 2021-2022

No	Indikator Sasaran	Tahun		Kenaikan / Penurunan (%)
		2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Nilai Tukar perikanan (NTP) (%)	103,01	104,46	1,41
2.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	17,31	18,22	5,26
3.	Produksi perikanan (ton)	939.907,08	906.023,56	(3,61)
4.	Angka konsumsi ikan (kg/kap/th)	67,04	67,04	0,00
5.	Jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)	150	228	52,00

- *Nilai Tukar Perikanan (NTP)*, Perkembangan NTP Perikanan Sulteng bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (q to q), NTNP Sulteng cenderung naik. Selama bulan Desember 2022 subsektor perikanan mengalami kenaikan indeks, sebesar 105,66 meningkat dari indeks bulan November 2022 sebesar 104,19 atau mengalami kenaikan

indeks sebesar 1,40 persen. Perubahan indeks yang diterima petani (It) pada bulan Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,61 persen dan indeks yang dibayar petani (Ib) mengalami kenaikan indeks sebesar 1,79 persen. Grafik NTP tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 15. NTP Sulteng Tahun 2021 – 2022

- *Rasio Kawasan Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial*, jika dibandingkan dengan tahun 2021 untuk indikator ini mengalami peningkatan 5,26%, yakni dari 17,31 pada tahun 2021 menjadi 18,22 pada tahun 2022.
- *Produksi Perikanan*, capaian produksi perikanan tahun 2022 lebih rendah 3,61% dari capaian tahun 2021. Pada tahun 2021 produksi perikanan sebesar 939.907,08 ton dan 906.023,56 ton pada tahun 2022. Akan tetapi ini masih merupakan angka sementara dimana sampai laporan ini dibuat proses validasi data belum selesai.
- *Angka Konsumsi Ikan*, capaian untuk indikator ini masih sama antara tahun 2021 dan 2022 yakni 67,04 kg/kap/th. Diperkirakan capaian tahun 2022 ini masih akan naik mengingat proses perhitungannya belum selesai.
- *Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP*, capaian pada indikator ini mengalami kenaikan 52% dari tahun sebelum, dimana pada tahun 2021 hari operasi dilaksanakan sebanyak 150 hari dan pada tahun 2022 sebanyak 228 hari.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2021-2026

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Tahun 2022 terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 DKP Sulteng dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 47. Capaian IKU terhadap Renstra KP 2021-2026

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2021	Target	Tahun 2022			Renstra KP 2021 – 2026	
					Realisasi	% capaian	% kenaikan 2021 – 2022	Target 2022	% capaian terhadap target 2022
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Perikanan (NTP) (%)	103,01	100	104,46	104,46	1,41	100	104,46
2	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	17,31	19,14	18,22	95,19	5,26	19,14	95,19
3	Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Produksi Perikanan (Ton)	939.907,08	1.491.033,02	906.023,56	60,76	(3,61)	1.491.033,02	60,76
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	67,04	55,39	67,04	121,03	0,00	55,39	121,03
4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	Jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)	150	200	228	114,00	52,00	200	114,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa:

1. Capaian indikator *Nilai Tukar Perikanan (NTP)* tahun 2022 melebihi 104,46% dari target Renstra yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan indeks yang diterima petani perikanan (It) lebih besar dari jumlah yang dibayarkan (Ib);
2. Capaian indikator *Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial* belum mencapai target target renstra 2021-2026, dimana target adalah 19,14 dan tercapai 18,22 atau sebesar 95,19%. Sampai dengan tahun 2021 luas kawasan konservasi perairan di Sulawesi Tengah sebesar 1.338.291,55 Ha dan pada tahun 2022 meningkat sebesar 70.000 Ha sehingga menjadi 1.408.291,55 Ha atau 14.082,92 Km2 pada tahun 2022;
3. Capaian indikator *Produksi Perikanan (Ton)* tidak mencapai target renstra, yakni hanya sebesar 60,76%, akan tetapi ini masih merupakan angka sementara dimana diperkirakan angka ini akan naik setelah proses validasi data antara daerah dan pusat selesai pada akhir triwulan I nanti.
4. Capaian indikator *Angka Konsumsi Ikan (Kg/kap/Th)* melebihi 121,03% dari target renstra. Angka ini sama dengan capaian tahun sebelumnya dimana angka pada tahun 2022 ini masih merupakan angka sementara dan diperkirakan masih akan naik pada akhir proses perhitungan.
5. Capaian indikator *Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari operasi)* melebihi 114% target renstra. Selama tahun 2022 dilakukan 228 hari operasi.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Standar Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja utama (IKU) DKP Sulteng tahun 2022 dengan capaian Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 48. Perbandingan Capaian IKU Dinas dengan Capaian Nasional Tahun 2022

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi Nasional 2022	Ket (+/-)
Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Perikanan (%)	104,46	105,75	-
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	18,22	-	+
Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Jumlah produksi perikanan (Ton)	906.023,56	20.480.000,00	-
	Angka konsumsi ikan (Kg/kap/th)	67,04	56,48	+
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	Jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)	200	-	+

Perbandingan capaian IKU Dinas dan Capaian nasional tahun 2022:

- Berdasarkan tabel diatas terlihat capaian NTP Nasional lebih tinggi dari capaian NTP Sulawesi Tengah. Dimana capaian nasional sebesar 105,75 dan capaian Sulawesi Tengah 104,46. Akan tetapi meskipun capaian NTP Sulteng lebih rendah tetapi nilainya berada diatas angka 100. Hal ini berarti bahwa nelayan/pembudidaya mengalami surplus (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha melebihi pertumbuhan pengeluaran rumah tangga);
- Tahun 2022 indikator *rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial*, tidak dilaksanakan oleh Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) RI sehingga capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional;
- Tahun 2022 target produksi perikanan Sulawesi Tengah 1.49 juta ton atau sebesar 5,50% dari target nasional yakni 27,09 juta ton. Realisasi produksi perikanan Sulawesi Tengah 2022 sebesar 0,906 juta ton atau sebesar 4,42% dari capaian target nasional yang mencapai 20,48 juta ton. Hal ini berarti produksi perikanan Sulawesi Tengah berkontribusi 4,42% terhadap produksi perikanan nasional;
- Tahun 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melalui Ditjen Penguatan Daya Saing (DJPDS) menetapkan target nasional untuk indikator *angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)* sebesar 59,53 dan tercapai 56,48* sedangkan target DKP Sulteng sebesar 55,39 dan tercapai 67,04*. Jika dibandingkan dengan capaian nasional maka capaian konsumsi makan ikan Sulteng sudah melebihi target daerah

maupun target nasional. Untuk skala nasional Sulawesi Tengah menempati peringkat ke-11 capaian angka konsumsi ikan. Provinsi dengan capaian tertinggi adalah Sulawesi Tenggara dan diikuti Maluku dan Maluku Tenggara.

5. Pengukuran indikator *jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)* tidak dilaksanakan oleh Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) RI sehingga realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan realisasi nasional.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja

Sebagian besar target kinerja DKP Sulteng tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja DKP Sulteng, antara lain:

1. **Nilai Tukar Perikanan**, target untuk indikator ini adalah 100,00 dan terealisasi sebesar 104,46. Capaian ini melebihi target sebesar 104,46%. Pencapaian ini tidak lepas dari upaya yang terus dilakukan oleh DKP Sulteng dalam menindaklanjuti masalah-masalah yang terjadi dilapangan. Beberapa masalah yang terjadi dilapangan antara lain: (1) keterbatasan benih dan induk berkualitas; (2) mahalnya harga pakan; (3) cuaca, serta (4) keterbatasan BBM bersubsidi. Upaya yang dilakukan DKP Sulteng dalam rangka menyikapi masalah-masalah diatas antara lain, melalui (1) pengembangan budidaya rumput laut sistem kultur jaringan, (2) pengembangan budidaya ikan air tawar sistem bioflok dan kolam terpal, (3) pemberian bantuan sarana produksi, (4) pendampingan bagi pelaku usaha, (5) peningkatan dan pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan provinsi sebagai sentra nelayan, (6) peningkatan sarana produksi perikanan tangkap bagi pelaku usaha, dan (7) pola fasilitasi penyediaan BBM, es balok dan sarana perbekalan antara lain air bersih.
2. **Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial**, Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan konservasi adalah luasnya kawasan perairan dan keterbatasan jumlah SDM yang mengelola kawasan konservasi. Solusi yang telah diupayakan oleh DKP Sulteng adalah dengan mengutamakan pelaksanaan kegiatan konservasi diwilayah yang dianggap paling krusial kerusakan habitatnya.
3. **Produksi perikanan**, tahun 2022 target produksi perikanan sebesar 1.491.033,02 ton dan terealisasi sementara 906.023,56 ton*. Tidak

tercapainya produksi perikanan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain menurunnya produksi budidaya rumput laut yang disebabkan oleh berkurangnya lahan budidaya rumput laut, cuaca yang kurang baik dan keterbatasan modal usaha. Beberapa solusi yang dilakukan oleh DKP Sulteng adalah dengan meningkatkan produksi udang dan ikan air tawar melalui pemberian bantuan sarpras budidaya ikan air tawar dan udang.

4. **Angka Konsumsi Ikan**, tahun 2022 target angka konsumsi ikan adalah 55,39 Kg/kap/th dan terealisasi sebesar 67,04 Kg/Kap/Th* atau 121,03%. Hal ini merupakan merupakan dampak dari suksesnya publisitas olahan produk perikanan kelautan dan kampanye gemar makan ikan yang dilaksanakan DKP Sulteng setiap tahunnya.
5. **Hari operasi pengawasan SDKP**, capaian indikator ini melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini tentu tidak lepas dari dukungan dan komitmen DKP Sulteng untuk menjaga kedaulatan wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, DKP Sulteng didukung oleh sumberdaya yang ada, antara lain oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS) yang berjumlah 8 (delapan) orang serta didukung juga dengan armada pengawas perikanan yang berjumlah 4 unit.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja

Dalam pencapaian perjanjian kinerja, DKP Sulteng didukung oleh beberapa program dan anggaran. Adapun alokasi anggaran per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 49. Alokasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)
Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya (%)	48.574.057.135	43.183.324.602	88,90
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	7.814.854.123	7.503.764.241	96,02
Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Jumlah produksi perikanan (Ton)	58.027.066.102	52.547.451.614	90,56
	Angka konsumsi ikan (Kg/kap/th)	4.090.105.203	3.702.366.235	90,52
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	Jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)	6.250.092.925	6.156.826.367	98,51

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis (SS) - 1 *meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan*, DKP Sulteng maka didukung anggaran sebesar Rp.48.574.057.135,- dan teralisasi Rp.43.183.324.602,- atau sebesar 88,90%.

Untuk mencapai sasaran strategis (SS) - 2 *terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan*, DKP Sulteng mendapat dukungan anggaran Rp7.814.854.123,- dan teralisasi Rp7.503.764.241,- atau sebesar 96,02%.

Untuk mencapai sasaran strategis (SS) - 3 *peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing*, dukungan

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2023

anggaran sebesar Rp 62.117.171.305,- dan teralisasi Rp56.249.816.849,- atau sebesar 90,55%,

Dalam upaya mencapai sasaran strategis (SS) 4 *terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP*, DKP Sulteng didukung anggaran Rp 6.250.092.925,- dan teralisasi Rp 6.156.826.367,- atau sebesar 98,51%.

Adapun program-program yang mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan DKP Sulteng, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 50. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan (SS1)							
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai Tukar Perikanan (%)	100	104,46	104,46	48.574.057.135	43.183.324.602	88,90
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya							
TOTAL SS1		100	104,46	104,46	48.574.057.135	43.183.324.602	88,90
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan (SS2)							
Program pengelolaan Ruang Laut	Rasio kawasan lindung perairan thd total luas perairan teritorial	19,14	18,22	95,19	7.814.854.123	7.503.764.241	96,02
TOTAL SS2		100	104,46	104,46	48.574.057.135	43.183.324.602	88,90
Peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing (SS3)							
Program Pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan (Ton)	1.491.033,02	906.023,56	60,76	58.027.066.102	52.547.451.614	90,56
Program pengelolaan perikanan budidaya							
Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka konsumsi ikan (Kg/kap/th)	55,39	67,04	121,03	4.090.105.203	3.702.366.235	90,52
TOTAL SS3		1.491.008,41	906.090,60	60,77	62.117.171.305	56.249.817.849	90,55
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP (SS4)							
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya dan Perikanan	Jumlah hari operasi pengawasan SDKP (hari operasi)	200	228	114,00	6.250.092.925	6.156.826.367	98,51
TOTAL SS4		200	228	114,00	6.250.092.925	6.156.826.367	98,51

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat:

1. SS- 1 didukung oleh 2 (dua) program yakni program pengelolaan perikanan budidaya dan program pengelolaan perikanan tangkap. Capaian kinerja sasaran ini sebesar sebesar 104,46% dan capaian realisasi anggaran 88,90%.
2. SS - 2 didukung oleh program pengelolaan ruang laut. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 95,19% dan capaian realisasi anggaran 95,34%.
3. SS – 3 didukung oleh 3 (tiga) program yakni program pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Capaian kinerja

sasaran ini sebesar 60,77% dan capaian realisasi anggaran 90,55%.

SS- 4 didukung oleh program pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 114,00% dan capaian realisasi anggaran 98,51%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Salah satu tupoksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat unit-unit kerja yang menangani langsung hubungan kepada masyarakat, yaitu: (1) Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Budidaya dan P2HP, Bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) mengurus masalah perizinan usaha perikanan; (2) UPT PMHP (Penerapan Mutu Hasil Perikanan), menangani sewa uji mutu hasil perikanan; (3) UPT Balai Perbenihan, melalui retribusi penjualan produk usaha daerah dengan menyediakan induk dan benih ikan dan udang serta ikan dan udang konsumsi; (4) UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I, II, III, IV, menangani masalah Pelayanan Jasa Usaha Pelabuhan Perikanan.

Berikut prosedur operasional dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang menangani pelayanan publik;

a. Bidang Budidaya dan P2HP, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang PRL

Bidang Budidaya dan P2HP, Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang PRL menangani masalah perijinan kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi di Sulawesi Tengah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan berasal dari perizinan usaha perikanan dimana memiliki kewenangan untuk menerbitkan SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIKPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan), dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan).

b. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi telah berupaya untuk membantu dalam pelaksanaan ekspor komoditi perikanan melalui sertifikasi mutu yang didasarkan pada hasil pengujian mutu dan pengawasan/monitoring penerapan PMMT mulai dari budidaya, penangkapan ikan, pengolahan sampai siap ekspor.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan No. 9 tahun 1985 dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 31 tahun 2004, pemerintah melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan dari praktek-praktek yang bertentangan dengan bidang kesehatan dan hygiene. Berdasarkan Undang – Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 7 ayat 2, standarisasi nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomkan. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014, kewenangan menerbitkan *Health Certificate* (HC) sudah menjadi kewenangan KKP melalui Badan Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Sesuai fungsinya sebagai pelayanan jasa dalam pengujian mutu hasil perikanan, dapat digambarkan prosesnya sebagai berikut :

1. UPT PMHP melakukan pengujian mutu terhadap sampel sesuai permintaan pelanggan meliputi:
 - a) Uji organoleptik
 - b) Uji Mikrobiologi
 - Analisis Lempeng Total (ALT)
 - *E.Coli*
 - *Salmonella*
 - c) Uji Kimia
 - *Cloramphenicol* (*disubkontrakkan*)

c. UPTD Balai Perbenihan Perikanan

UPTD Balai Perbenihan Perikanan di Sulawesi Tengah memiliki dua sub bagian yang menjadi prioritas, yaitu Perbenihan Ikan Air Tawar dan Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut. Perbenihan Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, sertifikasi perbenihan Air Tawar dan penyajian serta bimbingan pemanfaatan teknologi anjuran bidang pembenihan air tawar. Dalam pelaksanaan Tupoksi perbenihan air tawar didukung oleh 9 unit perbenihan sebagai berikut: (1) BBIS Kalawara (2) BBI Tulo (3) BBI Maenusi (4) BBI Lauwa (5) BBI Wuasa (6) Kolam Langaleso (7) Kolam Pakuli (8) BBI Tonusu (9) BBI Bolapapu. Pada BBI dan Kolam tersebut dikembangkan komoditas-komoditas unggulan sebagai berikut :

- 1) Ikan Mas
- 2) Nila Gift
- 3) Ikan Lele Dumbo
- 4) Ikan Hias
- 5) Ikan Mas Konsumsi
- 6) Ikan Nila Konsumsi

Pada Perbenihan Air Payau dan Laut, Sulawesi Tengah didukung oleh ketersediaan benih udang yang berkualitas baik yang berasal dari UPR, BBIP dan HSRT. Untuk mengoptimalkan kegiatan usaha pada Unit-unit tersebut, perbenihan perikanan Air Payau dan laut mempunyai tugas melakukan pembinaan operasional, menyampaikan dan memberikan bimbingan pemanfaatan dengan teknologi anjuran di bidang pembenihan ikan air payau dan laut dimana berlokasi di : (1) BBAP Kampal (2) BBAP Tindaki dan (3) HSRT Mamboro.

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, UPTD Balai Perbenihan melayani pembelian benih ikan air tawar, benur udang dan ikan konsumsi dimana masyarakat dapat langsung melakukan transaksi di unit perbenihan bersangkutan. Output dari pembelian benih, benur dan ikan konsumsi itu akan menjadi sumber PAD yang dihasilkan oleh UPTD Balai Perbenihan Perikanan bagi Sulawesi Tengah.

d. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I,II,III, dan IV

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan untuk sektor bidang perikanan tangkap yang bergerak pada obyek pelayanan masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah mengelola unit Pangkalan Pendaratan Ikan yang berada di beberapa Kabupaten sebagai tempat operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Sulawesi Tengah. PPI yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

berjumlah 6 (enam) lokasi, yaitu: PP Donggala dan PP Ogotua yang berada pada Wilayah I, PPI Paranggi yang berada di UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II, PPI Pagimana dan PPI Mato berada di UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III dan PPI Kolonodale berada di UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah IV. Ke-6 PPI merupakan tempat pemasaran hasil perikanan oleh nelayan dan pedagang ikan. Guna mendukung aktivitas pada PPI-PPI tersebut diperlukan kapal-kapal yang layak operasional sehingga UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah melakukan pelayanan penerbitan Sertifikat Pengujian Kapal, pelayanan penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) dan SPB (Surat Perintah Berlayar), dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian kapal
2. Petugas memeriksa dokumen kapal
3. Petugas memeriksa kondisi kapal yaitu bagian mesin dan body kapal untuk melihat kesesuaiannya dengan dokumen
4. Jika kondisi kapal laik untuk berlayar maka akan diterbitkan sertifikat

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan selama kurun waktu 2016 – 2021 memberikan dampak positif dan manfaat, akan tetapi tidak terlepas dari berbagai permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi.

Berdasarkan tugas dan fungsi, dalam pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yakni:

Tabel 51. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kesejahteraan pelaku usaha perikanan yang relatif masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Tukar Nelayan yang cenderung menurun setiap tahunnya • Nilai Tukar Pembudidaya yang masih berfluktuatif dengan rata-rata capaian pertahunnya 89,48% 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas SDM yang belum merata • Tingginya biaya operasional dibandingkan pendapatan
2	Masih rendahnya produksi dan produktifitas perikanan	Rasio rata-rata capaian pertahun perikanan budidaya dan perikanan tangkap masing-masing sebesar 0,88	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas SDM Pelaku usaha yang belum merata • Masih kurangnya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi teknis • Belum optimalnya sarana prasarana pendukung produksi perikanan • Masih didominasi oleh perikanan skala kecil/ teknologi sederhana • Sulitnya akses terhadap induk, benih dan pakan murah berkualitas • Sistem pendataan dan informasi yang belum terintegrasi • Keterbatasan BBM bersubsidi dan es • Transformasi teknologi serta inovasi yang belum berjalan baik • Infrastruktur kepelabuhanan yang belum mendukung • Konflik kepentingan dengan pengguna lain • Masih terbatasnya luasan tambak garam terintegrasi dan masih bersifat tradisional
3	Rendahnya daya saing produk perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi PDRB Perikanan yang cenderung menurun • Masih terbatasnya akses permodalan • Persentase produk olahan yang dihasilkan dibandingkan produksi yang ada < 1% • Belum optimalnya sistem logistik 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM aparatur dan pelaku usaha yang belum merata • Mayoritas Pelaku Usaha belum memiliki jaminan usaha • Penanganan pasca panen dan penanganan ikan dikapal yang masih konvensional • Keterbatasan sarana prasarana logistik dan pengolahan • Kurang optimalnya fungsi Kelembagaan Pelaku Usaha
4	Pengawasan dan penegakan hukum yang belum efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepatuhan pelaku usaha masih dibawah 100% • Peraturan yang sering berubah dan tumpang tindih 	<ul style="list-style-type: none"> • jumlah PPNS dan pengawas SDKP terbatas • Masih maraknya IUU Fishing • Sistem perijinan belum efektif dan efisien • Mahalnya biaya operasi pengawasan • Kurangnya sarana prasarana penegakan hukum

5	Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio kawasan lindung masih rendah, dibawah 20% • Masih banyaknya regulasi pengelolaan ruang laut yang tumpang tindih dan belum optimal • Pemanfaatan ruang laut yang belum sesuai zonasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP berkelanjutan • Infrastruktur dasar serta sarana prasarana terutama di pulau-pulau kecil baik bagi aparaturnya maupun masyarakat yang masih terbatas • Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, mangrove, lamun, terumbu karang) • Upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut tidak seimbang • Ketersediaan dokumen review RZWP3K
6	Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan	Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dengan efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten • Masih ada pelaksanaan kerja yang belum memiliki SOP / Instruksi Kerja serta manajemen resiko • Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan SDKP • Keterbatasan sarana prasarana aparaturnya terutama pada unit-unit pelaksana teknis

Dari identifikasi pada tabel diatas dirangkum akar-akar permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas SDM Pelaku usaha yang relatif rendah
2. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur yang belum optimal
3. Belum optimalnya sarana prasarana serta infrastruktur pendukung produksi
4. Masih didominasi oleh perikanan skala kecil/ teknologi sederhana
5. Transformasi teknologi serta inovasi yang belum berjalan baik
6. Sulitnya akses terhadap induk, benih dan pakan murah berkualitas
7. Keterbatasan BBM bersubsidi dan es
8. Tingginya biaya operasional dibandingkan pendapatan
9. Sistem pendataan dan informasi yang belum terintegrasi
10. Konflik kepentingan dengan pengguna lain
11. Masih terbatasnya luasan tambak garam terintegrasi dan masih bersifat tradisional
12. Mayoritas Pelaku Usaha belum memiliki jaminan usaha
13. Penanganan pasca panen dan penanganan ikan dikapal yang masih konvensional
14. Keterbatasan sarana prasarana logistik dan pengolahan
15. Kurang optimalnya fungsi Kelembagaan Pelaku Usaha
16. Masih maraknya IUU Fishing
17. Sistem perijinan belum efektif dan efisien
18. Mahalnya biaya operasi pengawasan
19. Kurangnya sarana prasarana penegakan hukum
20. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP berkelanjutan
21. Infrastruktur dasar serta sarana prasarana terutama di pulau-pulau kecil baik bagi aparaturnya maupun masyarakat yang masih terbatas
22. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, mangrove, lamun, terumbu karang)

23. Upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut tidak seimbang
24. Ketersediaan dokumen review RZWP3K
25. Masih ada pelaksanaan kerja yang belum memiliki SOP / Instruksi Kerja serta manajemen resiko
26. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan SDKP
27. Keterbatasan sarana prasarana aparatur terutama pada unit-unit pelaksana teknis

2.3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Mengacu pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025 Tahap Keempat, Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur yang disusun atas dasar kondisi obyektif kekinian daerah, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026, ditetapkan dengan rumusan:

“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Visi sebagai cita-cita dan harapan yang ingin diwujudkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah 5 (lima) tahun ke depan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sulawesi Tengah: adalah kesatuan wilayah dan masyarakat provinsi yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) yang disahkan pada 23 September 1964. Sebagai daerah otonom, maka Provinsi Sulawesi Tengah dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, yang secara administratif terbagi ke dalam 12 kabupaten dan 1 kota.

Sebagai penjabaran **Visi** RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026, maka dirumuskan **Misi** sebagai berikut:

Misi 1: *Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.* Misi ini dimaksudkan untuk

Misi 2: *Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.*

Misi 3: *Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.*

Misi 4: *Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.*

Misi 5: *Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.*

Misi 6: *Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.*

Misi 7: *Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.*

Misi 8: Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.

Misi 9: Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat dipakai untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan menjadi input dalam perumusan isu-isu strategis dalam pelayanan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 52. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju				
No	Misi dan Program Gubernur Sulawesi Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM	Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dengan efektif dan efisien	a) Kurangnya ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten b) Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan SDKP c) Masih ada pelaksanaan kerja yang belum memiliki SOP / Instruksi Kerja serta manajemen resiko d) Keterbatasan sarana prasarana aparatur yang memadai terutama pada unit-unit pelaksana teknis	a) Adanya payung hukum yang jelas terhadap tupoksi untuk pelayanan umum; b) Peluang untuk sertifikasi ISO 9001:2015 c) Sebagian besar sarana dan prasarana telah ada hanya memerlukan pemeliharaan d) Teknologi informasi yang semakin mudah

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2023

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju				
No	Misi dan Program Gubernur Sulawesi Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan	a. Rasio rata-rata capaian pertahun perikanan budidaya dan perikanan tangkap masing-masing sebesar 0,88 b. Kontribusi PDRB Perikanan yang cenderung menurun c. Masih terbatasnya akses permodalan d. Persentase produk olahan yang dihasilkan dibandingkan produksi yang ada < 1% e. Belum optimalnya sistem logistik perikanan	a) Sarana prasarana yang ada masih terbatas dan sebagian besar yang telah ada masih konvensional b) Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur yang belum optimal c) Kualitas SDM Pelaku usaha yang belum merata d) Keterbatasan akses pakan, benih, es serta BBM bersubsidi menyebabkan biaya produksi yang besar e) Sistem logistik ikan belum tertata dengan baik dan efisien f) Ketersediaan data dan informasi yang belum terintegrasi g) Pemahaman mengenai system jaminan mutu yang masih kurang h) Mayoritas pelaku usaha masih menggunakan teknologi tradisional i) Mayoritas usaha yang dijalankan masih memiliki resiko tinggi j) Kelembagaan pelaku usaha yang belum optimal k) Masih maraknya konflik kepentingan antar pengguna	a) Komitmen pemerintah terkait pembiayaan untuk kemajuan sektor kelautan dan pemerintah b) Terbangunnya kesadaran aparaturn akan pentingnya pelayanan c) Adanya keinginan pelaku usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya d) Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar e) Ketersediaan teknologi pakan ikan f) Penataan wilayah sistem logistik ikan g) Rekonstruksi sarana prasarana dan pengembangan teknologi h) Telah terbangunnya kesadaran dan motivasi akan pentingnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju				
No	Misi dan Program Gubernur Sulawesi Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Misi 6: Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan	a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha masih dibawah 100% b. Rasio kawasan lindung masih rendah, dibawah 20% c. Masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan belum optimal d. Pemanfaatan ruang laut yang belum sesuai zonasi	a. Sarana prasarana pengawasan serta pengelolaan ruang laut yang ada masih terbatas b. Kualitas dan kuantitas SDM Pengawas dan pengelola ruang laut yang relatif rendah c. Sistem perijinan yang belum efektif dan efisien d. Mahalnya biaya operasi pengawas e. Maraknya kegiatan <i>Illegal Unreported dan Unregulated Fishing (IUU)</i> f. Upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut tidak seimbang	i) Komitmen pemerintah dalam pengelolaan dan pengawasan SDKP j) Optimalisasi pemberdayaan petugas pengawas sumberdaya ikan di laut k) Adanya Pelayanan perijinan satu pintu dan terpadu l) Rekonstruksi sarana prasarana dan pengembangan teknologi m) Telah terbangunnya kesadaran dan motivasi akan pentingnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak n) telah tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

Dari 5 Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat 1 Misi yang didukung oleh pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, yakni:

Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga mampu menggerakkan perekonomian guna meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya mengatasi kerentanan sosial yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak bencana alam dan sosial, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Provinsi Sulawesi Tengah.

2.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Renstra K/L

Telaahan terhadap Renstra K/L dan SDKP Provinsi perlu dilakukan untuk menilai sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sarana Renstra OPD.

Tabel 53. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Sebagai Faktor		
			Penghambat	Pendorong	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	PDB Perikanan (%)	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas SDM Aparatur yang masih relatif rendah 	e) Kurangnya ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten	e) Adanya payung hukum yang jelas terhadap tupoksi untuk pelayanan umum;	
2	Produksi perikanan (ton)		f) Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan SDKP	f) Peluang untuk sertifikasi ISO 9001:2015	
a)	Perikanan tangkap		g) Masih ada pelaksanaan kerja yang belum memiliki SOP / Instruksi Kerja serta manajemen resiko	g) Sebagian besar sarana dan prasarana telah ada hanya memerlukan pemeliharaan	
b)	Perikanan budidaya		h) Keterbatasan sarana prasarana aparaturnya yang memadai terutama pada unit-unit pelaksana teknis	h) Teknologi informasi yang semakin mudah	
3	Produksi garam rakyat (juta ton)		<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur dasar yang masih kurang terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil Sistem pendataan dan akses informasi yang belum optimal 	a) Luasan dan kontur wilayah Sulawesi Tengah yang beragam	a) Komitmen pemerintah terkait pembiayaan dan kemajuan sektor kelautan dan pemerintah
4	NTN/NTPi (%)			b) Ketersediaan data dan informasi yang belum akurat	b) Kuantitas SDM Kelautan dan Perikanan yang memadai untuk diberdayakan
5	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)			c) Pemahaman tentang pentingnya data yang masih kurang	
6	Konsumsi ikan (kg/kap/th)			d) Kualitas dan kuantitas SDM Pengelola data informasi yang relatif masih lemah	
7	Jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola (pulau)			e) Keterbatasan sarana prasarana pengolahan informasi dan data kelautan dan perikanan	
8	Luas kawasan konservasi perairan (ha)				
9	Wilayah perairan bebas IUU fishing (%)				
10	Jumlah kasus penolakan ekspor per Negara mitra (kasus)				
	Jumlah hasil litbang yang inovatif (hasil litbang)				
	Rasio jumlah peserta yang dididik, dilatih dan disuluh yang kompeten di bidang KP (%)				
		<ul style="list-style-type: none"> Kualitas SDM Pelaku Usaha Perikanan yang masih relatif rendah Belum optimalnya kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan Masih kurangnya akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan 	a) Rendahnya tingkat pendidikan SDM pelaku usaha perikanan b) Kemampuan kapasitas kelembagaan pelaku usaha masih terbatas c) Masih kurangnya kepercayaan dunia perbankan pada sektor perikanan d) Prosedur perbankan yang sulit dipenuhi bagi pelaku usaha perikanan skala kecil e) Tingkat suku bunga kredit yang masih relatif tinggi	a) Keinginan pelaku usaha untuk meningkatkan taraf hidup b) Adanya kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha yang dilakukan oleh OPD c) Mulai banyaknya inovasi teknologi yang dilakukan bidang kelautan perikanan yang melibatkan perbankan	
		<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya sarana dan prasarana kelautan 	a) Sarana prasarana yang ada masih terbatas dan sebagian besar yang	a) Komitmen pemerintah terkait pembiayaan dan	

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2023

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan perikanan <ul style="list-style-type: none"> • Masih sederhananya teknologi yang diterapkan • Terbatasnya ketersediaan induk unggul, benih bermutu dan pakan murah berkualitas • Rendahnya daya saing produk perikanan • Belum optimalnya pemanfaatan pasar di dalam dan luar negeri • Belum optimalnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan • Terjadinya konflik kepentingan dengan pengguna lain • Kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan yang masih terbatas • Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan perikanan • Penegakan hukum yang masih belum efektif dan efisien • Belum optimalnya peran masyarakat dalam mengelola kawasan perairan 	telah ada masih konvensional <ul style="list-style-type: none"> b) Kualitas SDM Kelautan Perikanan yang relatif rendah c) Sebagian besar pakan masih didatangkan dari luar negeri d) Industri penyediaan bahan baku pakan lokal masih sangat terbatas e) Mahalnya pakan mengakibatkan ongkos produksi yang besar f) Sistem logistik ikan belum tertata dengan baik dan efisien g) Sistem perijinan yang belum efektif dan efisien h) Kurangnya sarana dan prasarana penegak hukum di laut i) Mahalnya biaya operasi pengawas j) Maraknya kegiatan <i>Illegal Unreported dan Unregulated Fishing (IUU)</i> 	kemajuan sektor kelautan dan pemerintah <ul style="list-style-type: none"> b) Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar c) Peningkatan mutu dan jaminan keamanan pangan d) Optimalisasi pemberdayaan petugas pengawas sumberdaya ikan di laut e) Penataan wilayah sistem logistik ikan f) Pelayanan perijinan satu pintu dan terpadu yang mulai dilakukan oleh pemerintah g) pengendalian pemanfaatan ekosistem laut, perairan umum dan sumberdaya ikan h) Rekruturisasi sarana prasarana dan pengembangan teknologi i) Telah terbangunnya kesadaran dan motivasi akan pentingnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak j) Telah tersusunnya Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) k) Penguatan regulasi dan kebijakan

2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) adalah merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang provinsi. RTRWP disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang

berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah. Pertimbangan lain adalah keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam di wilayah Provinsi, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan antar provinsi, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Tujuan penataan ruang Provinsi adalah untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian, kelautan, pariwisata dan pertahanan keamanan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah untuk bidang perikanan kelautan adalah peningkatan sumberdaya perikanan dan kelautan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata dan peningkatan aksesibilitas pemasaran produksi pertanian dan kelautan.

Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan sumberdaya perikanan dan kelautan terdiri atas:

- a. mengembangkan jenis usaha budidaya perikanan air tawar;
- b. meningkatkan kemampuan dan teknologi perikanan budidaya dan tangkap;
- c. mengembangkan industri ekowisata bahari;
- d. mempertahankan dan meningkatkan kawasan mangrove ;
- e. mengembangkan budidaya perikanan dan kelautan yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil; dan
- f. mempertahankan kawasan lindung di luar kawasan peruntukan pertambangan untuk mendukung pertanian, kelautan dan pariwisata.

Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata terdiri atas:

- a. mengembangkan lembaga pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan guna mendukung pertanian, kelautan dan pariwisata;
- b. menjamin ketersediaan informasi pertanian, kelautan dan pariwisata; dan
- c. mengembangkan sistem pendidikan non formal yang berkelanjutan guna peningkatan kualitas produksi dan hasil pertanian, kelautan dan pariwisata.

Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah terdiri atas:

- a. mengembangkan sistem jaringan penghubung antar wilayah laut, darat, dan udara pada PKN, PKW, dan PKL;
- b. mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan penghubung antar pusat produksi pertanian, kelautan dan pariwisata, dengan PKN, PKW, dan PKL;
- c. mengembangkan prasarana pertanian, kelautan dan pariwisata;
- d. mengembangkan sistem jaringan dan moda transportasi guna mendukung sektor pertanian;

- e. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuhkembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik;
- f. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi; dan
- g. meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana wilayah lainnya.

Tabel 54. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana tata ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana Kawasan Budidaya Provinsi (Kawasan Andalan (Kadal) dan Kawasan Strategis Provinsi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya kualitas SDM baik aparatur maupun pelaku usaha perikanan di bidang kelautan dan perikanan; 2. Infrastruktur dasar yang masih kurang terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil; 3. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan dan kelautan; 4. Kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang kurang optimal; 5. Belum optimalnya sistem pendataan dan akses informasi yang akurat dan mudah diakses masyarakat; 6. Kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan yang masih terbatas; 7. Konflik kepentingan dengan pengguna lain; 8. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya ketersediaan SDM aparatur yang kompeten; 2. Luasan dan kontur wilayah Sulawesi Tengah yang beragam; 3. Ketersediaan data dan informasi yang belum akurat; 4. Pemahaman tentang pentingnya data yang masih kurang; 5. Keterbatasan sarana prasarana pengolah informasi dan data kelautan dan perikanan; 6. Rendahnya tingkat pendidikan SDM pelaku usaha perikanan; 7. Kemampuan kapasitas kelembagaan pelaku usaha masih terbatas; 8. Sistem logistik ikan belum tertata dengan baik dan efisien; 9. Sarana prasarana yang ada masih terbatas dan sebagian besar yang telah ada masih konvensional; 10. Kurangnya sarana dan prasarana penegak hukum di laut; 11. Mahalnya biaya operasi pengawas; 12. Maraknya kegiatan <i>Illegal Unreported dan Unregulated Fishing (IUU)</i>; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas aparatur yang cukup besar; 2. Sarana dan prasarana serta lingkungan kerja yang memadai; 3. Kuantitas SDM Kelautan dan Perikanan yang memadai untuk diberdayakan; 4. Adanya kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha yang dilakukan oleh OPD; 5. Komitmen pemerintah terkait pembiayaan dan kemajuan sektor kelautan dan perikanan; 6. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar; 7. Optimalisasi pemberdayaan petugas pengawas sumberdaya ikan di laut; 8. Penataan wilayah sistem logistik ikan; 9. Pelayanan perijinan satu pintu dan terpadu yang mulai dilakukan oleh pemerintah; 10. pengendalian pemanfaatan ekosistem laut, perairan umum dan sumberdaya ikan; 11. Rekstrukturisasi sarana prasarana dan pengembangan teknologi; 12. Telah terbangunnya kesadaran dan motivasi akan pentingnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak; 13. Telah tersusunnya

No	Rencana tata ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			13. Rendahnya kualitas SDM masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.	Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K); 14. Penguatan regulasi dan kebijakan.

2.5.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategi

a) Implikasi KLHS bagi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 55. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No	RTRW terkait Tugas & Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dislutkan Provinsi Sulawesi Tengah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana Kawasan Budidaya Provinsi (Kawasan Andalan (Kadal) dan Kawasan Strategis Provinsi)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infrastruktur dasar yang masih kurang terutama di wilayah pesisir dan PPK ▪ Belum optimalnya pengelolaan potensi kelautan dan perikanan ▪ Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait pengendalian pemanfaatan SDKL ▪ Terjadinya konflik kepentingan dengan pengguna lain ▪ Kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan yang masih terbatas ▪ Penegakan hukum yang masih belum efektif dan efisien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan dan kontur wilayah Sulawesi Tengah yang beragam 2. Ketersediaan data dan informasi yang belum akurat 3. Keterbatasan sarana prasarana pengolahan informasi dan data kelautan dan perikanan 4. Sistem perijinan yang belum efektif dan efisien 5. Kurangnya sarana dan prasarana penegak hukum di laut 6. Mahalnya biaya operasi pengawas 7. Maraknya kegiatan <i>Illegal Unreported dan Unregulated Fishing (IUU)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar 2. Optimalisasi pemberdayaan petugas pengawas sumberdaya ikan di laut 3. Komitmen pemerintah terkait pembiayaan dan kemajuan sektor kelautan dan pemerintah; 4. Pelayanan perijinan satu pintu dan terpadu yang mulai dilakukan oleh pemerintah 5. Pengendalian pemanfaatan ekosistem laut, perairan umum dan sumberdaya ikan 6. Rekstrukturisasi sarana prasarana dan pengembangan teknologi 7. Telah terbangunnya kesadaran dan motivasi akan pentingnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak 8. Telah tersusunnya Perda RZWP3K 9. Penguatan regulasi dan kebijakan

2.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk menentukan isu-isu strategis maka perlu mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari gambaran pelayanan dinas, sasaran jangka menengah pada renstra K/L,

sasaran jangka menengah pada renstra PD, implikasi RTRW bagi pelayanan PD dan implikasi KLHS bagi pelayanan PD.

Tabel 56 Identifikasi Isu Isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Isu lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Degradasi kondisi ekosistem lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil Masih maraknya pencurian terumbu karang dan penebangan mangrove Pencemaran wilayah pesisir yang diakibatkan oleh aktifitas kegiatan pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan belum optimal Kualitas SDM Koordinasi antar instansi belum optimal Sistem pendataan dan akses informasi yang masih terbatas 	
2	Isu Illegal fishing	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan stok ikan <i>Overfishing</i> akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang terkonsentrasi pada suatu tempat 	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan masih terbatas Konflik kepentingan dengan pengguna lain Penegakan hukum yang masih belum efektif dan efisien 	
3	Isu ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> Harga komoditas fluktuatif, cenderung turun, nelayan/pembudidaya ikan merugi Masih rendahnya minat pelau usaha budidaya untuk sertifikasi unit usahanya bagi keperluan <i>food safety</i> dan jaminan mutu Sempitnya lahan perairan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan usaha perikanan budidaya Angka kemiskinan masih relatif tinggi, terutama di kalangan nelayan di wilayah pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya harga pakan yang berimbas terhadap tingginya ongkos produksi budidaya Inovasi teknologi pada usaha perikanan Terbatasnya ketersediaan induk unggul, benih bermutu dan pakan murah berkualitas Belum optimalnya sarana dan prasarana penangkapan ikan Terbatasnya sarana prasarana produksi Belum optimalnya peran dan fungsi Sentra-sentra perikanan Konflik kepentingan antar pengguna misalnya nelayan yang masih marak terkait pemanfaatan pengelolaan ruang laut 	
4	Persaingan pasar global dan industrialisasi	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya daya saing produk perikanan kelautan Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan infrastruktur dasar Terbatasnya akses permodalan Sistem perijinan yang belum efektif dan efisien 	

Melalui penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan, maka dilakukan penentuan isu-isu strategis, yakni:

1. Kualitas SDM kelautan dan perikanan baik aparaturnya maupun pelaku usaha;
2. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
3. Pengawasan dan penegakan hukum.

2.7 Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka mencapai sasaran, pada tahun anggaran 2023 ditetapkan beberapa beberapa usulan program dan kegiatan yang terangkum dalam anggaran APBN dan APBD, sebagai berikut:

A. Program APBN Tahun 2023

Pada APBN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 6 program besar sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP dengan kegiatan : (1) Pengelolaan Keuangan KKP, (2) Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP, (3) Pengelolaan Data Statistik dan Informasi
2. Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap dengan kegiatan : (1) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, (2) Pengendalian Penangkapan Ikan, (3) Pengelolaan Kenelayanan, (4) Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI), (5) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.
3. Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dengan kegiatan: (1) Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan, (2) Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan, (3) Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan, (4) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya, (5) Pengelolaan Pakan Ikan.
4. Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan kegiatan : (1) Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan, (2) Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan, (3) Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan, (4) Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan, (5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen DJPDSPKP.
5. Program pengelolaan ruang laut dengan kegiatan : (1) Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, (2) Perencanaan Ruang Laut, (3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dirjen PRL.
6. Program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan kegiatan : (1) Operasional Kapal Pengawas, (2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, (3) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP.

Terdapat 3 (tiga) prioritas dalam pelaksanaan arah kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2021-2024, yaitu :

- 1) Penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan, untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNPB dan kesejahteraan nelayan
- 2) Pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor, dengan komoditas unggulan antara lain udang, lobster, kepiting, dan rumput laut
- 3) Pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal, untuk pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga kepunahan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi

Yang diperkuat dengan :

- a) Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan kualitas mutu untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor
- b) Pengelolaan ruang laut, perairan umum, pesisir dan pulau - pulau kecil sebagai landasan pemanfaatan dan pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem karantina ikan
- c) Penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM untuk pengembangan usaha KP

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan kelautan dan perikanan tahun 2023, terdapat beberapa program yang diusulkan oleh Sulawesi Tengah, yaitu :

- 1) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan(UPTD Provinsi), yang difokuskan pada PPI Mato, Banggai Laut dan PPI Labuan Bajo, Donggala;
- 2) Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) pada BBI Kalawara, BBI Tulo dan BBAP Kampal/ Tindaki;
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi – Provinsi pada 4 KKPD dan lokasi prioritas pengawasan.

B. Program APBD Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimuktahirkan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, terdapat perubahan susunan Program/ Kegiatan untuk dana yang bersumber dari APBD dimana sebelumnya terdiri dari 13 program dan 44 kegiatan menjadi 6 (enam) program dan 27 kegiatan, sebagai berikut:

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, meliputi (1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2) Administrasi Keuangan (3) Administrasi Umum (4) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 2) PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, meliputi (1) Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (2) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (3) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- 3) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP, meliputi (1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil (2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (3) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT (4) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil (5) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (6) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (7)

Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT (8) Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (9) Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT (10) Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- 4) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA, meliputi (1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (2) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (3) Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (4) Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (5) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
- 5) PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, meliputi : (1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil (2) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- 6) PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN, meliputi : (1) Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Keenam program ini didorong dalam rangka membantu pengentasan kemiskinan dimana ditargetkan akan mencapai 8% diakhir periode Renstra dari 26.927 KK dari Jumlah Nelayan ± 89.026 orang di Sulteng sesuai data P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan peningkatan produktifitas komoditas perikanan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaah Terhadap RPJMN 2020-2024

Sesuai dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi acuan bagi setiap daerah dalam pengembangan sektor ini adalah:

Pengelolaan sumberdaya ekonomi

1. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; (2) meningkatkan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (3) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; (4) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; (5) meningkatkan SDM, riset kemaritiman dan kelautan serta perbaikan sistem database kelautan dan perikanan; (6) menyusun pedoman penyelerasan RZWP3K dan RTRW Provinsi.

Pengelolaan perikanan akan difokuskan pada penguatan manajemen di 11 WPP, dan pengembangan sentra-sentra produksi perikanan yang berdaya saing. Pengembangan komoditas utama perikanan dan kelautan mencakup komoditas udang, tuna, rumput laut, rajungan dan ikan nila serta garam akan dilakukan di provinsi-provinsi yang memiliki keunggulan kompetitif wilayah di Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, Maluku dan Papua.

2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan industri berbasis pertanian, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (2) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; (3) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital; (4) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi; (5) meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (6) meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN; (7) meningkatkan industri halal dan produk sehat.

3.1.2 Sinergitas RPJMN, RKP 2023 , Renstra KKP RI dalam mendukung Program Nasional

Tujuh agenda pembangunan RPJMN adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (6) Membangun Lingkungan Hidup,

Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dan (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran Pembangunan RPJMN 2020-2024: Pembangunan yang Berkualitas yaitu dengan Meningkatnya kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya kesenjangan pendapatan dan wilayah, serta terjaganya keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi dimana kesemuanya itu diukur melalui tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks rasio gini, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia serta penurunan gas emisi rumah kaca (GRK) menuju target 29% ditahun 2030 (*Paris Agreement*).

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 bertema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dijabarkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN). PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumabuhan berkualitas dan berkadilan. PN 2 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. PN 3 adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing. PN 4 Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan. PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar. PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. PN 7 adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Terdapat 14 *Major Project* yang diidentifikasi memiliki peran signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan, yakni Kawasan Industri Prioritas dan *Smelter*, Pengelolaan Terpadu UMKM, *Food Estate*, Destinasi Pariwisata Prioritas, Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Pendidikan Keterampilan, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, Wilayah Adat Papua: Laa Pago dan Domberay, Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Transformasi Digital, dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024

- 1) Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.
- 2) Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
- 3) Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan
- 4) Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- 5) Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan

Usulan Prioritas Nasional Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

a) Ditjen Perikanan Tangkap

No.	Kegiatan/RO
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan Serifikasi Profesi dan SDM dibidang Kapal Perikanan Dokumen awak kapal perikanan Bantuan Kapal Perikanan Bantuan Alat Penangkapan Ikan Fasilitas Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Awak Kapal Perikanan Penerapan prinsip HAM Pada Usaha Perikanan Tangkap
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk menunjang PNPB perikanan tangkap Pelabuhan perikanan UPT Daerah yang ditingkatkan fasilitasnya untuk menunjang PNPB perikanan tangkap Kajian rencana pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional Pengembangan Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan Petugas pengolah data dan verifikasi pemungutan PNPB perikanan tangkap di pelabuhan perikanan Pelabuhan Perikanan di Lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar Pelatihan dan penetapan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayan Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya Kampung nelayan yang difasilitasi penataannya Kelembagaan usaha nelayan yang dikembangkan sebagai korporasi nelayan Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang disalurkan Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju) Sarana penunjang pemungutan PNPB perikanan tangkap yang disediakan
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer diatas kapal perikanan Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi Prasarana Perikanan Tangkap Perairan Darat yang di tingkatkan fasilitasnya Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun

b) Ditjen Perikanan Budidaya

No.	Program/Kegiatan/RO
2344	Pengelolaan Perbenihan Sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat Unit Pembenuhan Skala Kecil yang dibangun / direhabilitasi Bibit Rumpul Laut yang disalurkan ke masyarakat Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Calon Induk Unggul yang diproduksi Pusat Produksi Benih dan Induk yang dikembangkan Prasarana perbenihan di Kampung Perikanan Budidaya yang dikembangkan Sarana dan Prasarana Perbenihan Ikan yang dikembangkan (mendukung Korporasi Perikanan Budidaya) Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Perbenihan
2345	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan Sampel Monitoring Residu yang diuji Sampel Monitoring Penyakit Ikan yang diuji Sarana kawasan dan kesehatan ikan yang disalurkan ke masyarakat Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) Kluster kawasan tambak Udang dan Bandeng yang dikembangkan Infrastruktur budidaya udang berkelanjutan yang ditingkatkan Prasarana kawasan dan kesehatan ikan di Kampung Perikanan Budidaya yang dikembangkan Prasarana produksi perikanan budidaya di UPT Sarana dan Prasarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang dikembangkan (mendukung Korporasi Perikanan Budidaya) Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan
2346	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat Prasarana Produksi dan Usaha yang dikembangkan Prasarana produksi dan usaha di Kampung Perikanan Budidaya yang dikembangkan Sarana dan Prasarana Produksi dan Usaha Budidaya yang dikembangkan (mendukung Korporasi Perikanan Budidaya) Bantuan Premi Asuransi Usaha Perikanan Budidaya yang disalurkan Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha Rekomendasi bidang lahan pembudidayaan ikan yang akan disertifikasi
5747	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan Peralatan/sarana pakan dan obat ikan yang disalurkan ke masyarakat Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Prasarana Pakan di Kampung Perikanan Budidaya yang dikembangkan Sarana dan Prasarana Pakan dan Obat Ikan yang dikembangkan (mendukung Korporasi Perikanan Budidaya) Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Pakan dan Obat Ikan

c) Ditjen PSDKP

No.	Program/Kegiatan/RO
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan
	Operasi Kapal Pengawas
	Operasi Pesawat Patroli
	Kapal Pengawas (Kelas II multiyears)
	Kapal Pengawas Kelas III
	Speedboat Pengawas
	Armada Pengawasan SDKP yang dirawat
	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional
	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun
	Operasional Speedboat Pengawas
	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
	Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya
	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
	Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya
	Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya

d) Ditjen PDSPKP

No.	Program/Kegiatan/RO
2356	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
	Rekomendasi Kebijakan sistem telusur dan logistik Ikan Nasional
	Rekomendasi Kebijakan Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik
	Penyusunan Rekomendasi Indeks Kinerja Logistik Ikan
	Pengelola Gudang Beku yang Difasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang
	Gudang Beku Portable
	Mobil refrigasi (berpendingin)
	Mobil nonrefrigasi (tidak berpendingin)
	Teknologi Informasi Mendukung STELINA yang disediakan
	Gudang Beku
2360	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan
	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Klaster Daya Saing KP
	Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya
	Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina
	UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program
	Startup Millenial
	Gerai Investasi dan Layanan Usaha
	Lembaga SKPT yang menjadi tanggung jawab Ditjen PDSPKP yang difasilitasi dan dibina
2357	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
	Rekomendasi kebijakan perencanaan (feasibility study) pembangunan pasar ikan bertaraf internasional
	Rekomendasi Kebijakan Profiling Pasar Ekspor Dan Strategi Perluasan Akses Pasar Negara Tujuan Ekspor
	Rekomendasi Kebijakan Profiling Pasar Dalam Negeri dan Strategi Perluasan Akses Pasar Dalam Negeri
	Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
	Kampanye Gemarikan yang dilaksanakan oleh daerah (Dekonsentrasi)
	Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional
	Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri
	Peralatan Pemasaran
	Pasar Ikan
	Sentra Kuliner Ikan
	Sistem Informasi Bursa Pasar Ikan
2358	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
	Rekomendasi Pemberitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) oleh daerah (Dekonsentrasi)
	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) yang diterbitkan
	Chest freezer
	Peralatan pengolahan ikan
	Sarana Pasca Panen
	Kemasan Produk Olahan
	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu
	Pabrik Es
5279	Pengujian dan Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan
	UMKM yang Dibina dalam Inkubator Bisnis
	Teknologi Informasi Mendukung Prasarana Raiser Ikan Hias yang Disediakan
	Prasarana Raiser Ikan Hias

e) Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

2362	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
	Rekomendasi Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut
	Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut
	Dokumen NSPK Konservasi dan keanekaragaman Hayati Laut
	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi
	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional
	Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan
	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan
	Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan
	Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Pengelola Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kompetensinya
4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Diedukasi Penanggulangan Dampak Pencemaran
	Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Diedukasi Mitigasi Bencana dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim
	Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh
	Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
	Prasarana Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Kawasan mangrove yang direhabilitasi
	Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana
	Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove
	Dokumen NSPK Pencegahan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil
2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan
	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi
	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut

No.	Program/Kegiatan/RO
	Dokumen NSPK Jasa Kelautan
	Sarana prasarana Wisata Bahari
	Sarana prasarana BMKT
	Sarana Niaga Garam Rakyat yang dibangun
	Sarana produksi biofarmakologi yang dibangun
	Lahan Garam yang difasilitasi
2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya
	Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar
	Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar
2366	Perencanaan Ruang Laut
	Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan
	Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam RTR KSN
	Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam RTR KSN
	Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan
	Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN
	Rekomendasi kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)
	Rekomendasi kebijakan pendelegasian kewenangan penerbitan persetujuan dan konfirmasi KKPRL
	Rekomendasi kebijakan monitoring dan verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut
	Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut
	Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi
	Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

f) BRSDMKP

No.	Program/Kegiatan/RO
2375	Pelatihan dan Penyuluh Kelautan dan Perikanan
	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP
	Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan KP
	Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih
2376	Pendidikan Kelautan dan Perikanan
	Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi Pendidikan Tinggi
	Peralatan dan Mesin Pendidikan KP
	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan
	Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya
	Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya
	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
	Kajian Pendidikan Tinggi KP
6703	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan
	Sarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan
	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan
	Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan
6704	Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan
	Sarana Inkubasi Bisnis Perikanan
	Prasarana Inkubasi Bisnis Perikanan
6706	Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
	Rekomendasi Kebijakan Responsif Sosial Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan

g) BKIPM

No.	Program/Kegiatan/RO
3988	Karantina Ikan
	Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity
	Sertifikat karantina ekspor, impor dan domestik
	Perkara pelanggaran peraturan perkarantinaan ikan yang di selesaikan
	Sarana pengawasan karantina
	Prasarana pengawasan karantina
3990	Standarisasi Sistem dan Kepatuhan
	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan
	Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan
	Unit kerja yang menerapkan standar sistem
	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen
	Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan
	Unit kerja wilayah perbatasan yang telah menerapkan standar pelayanan mutu dan karantina
3989	Pengendalian Mutu
	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya
	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI
	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability
	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
	Sarana Pengujian Mutu
	Prasarana Pengujian Mutu

Dukungan Pemerintah Daerah yang diharapkan terhadap Sektor Kelautan dan Perikanan

- 1) Penyelesaian Sinkronisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dengan Dokumen RTRWP.
- 2) Pembinaan dan pendampingan UMKM Sektor Kelautan & Perikanan untuk peningkatan skala usaha.
- 3) Penguatan Kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat melalui peningkatan dan perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan dalam rangka penanganan *Stunting*.

- 4) Dukungan penyediaan lahan yang *clear* dan *clean* dalam mendukung kegiatan prioritas KKP (pelabuhan perikanan, *cold storage*, pasar dll).
- 5) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mendukung masuknya investasi sektor kelautan dan perikanan.
- 6) Fasilitasi pelaku utama KP dalam rangka pelatihan dan sertifikasi kompetensi
- 7) Penjabaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) terkait kelautan dan perikanan dalam RPJMD untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
- 8) Penguatan sistem data statistik kelautan dan perikanan di daerah dengan satu data KKP.

Arah dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan didalam mendukung percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Bila merunut arah dan kebijakan nasional diatas, fokus pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya
2. Peningkatan produksi perikanan, konsumsi ikan per kapita serta ekspor hasil perikanan
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan
4. Pengembangan teknologi informasi dan IPTEK untuk mendukung pengembangan usaha sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah
5. Peningkatan mutu produk hasil perikanan dan pengurangan losses
6. Peningkatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan POKMASWAS; pengembangan kerjasama dengan instansi terkait lainnya termasuk TNI-AL, Bea cukai, Perhubungan, Perdagangan, dll; sosialisasi aturan dan pentingnya pengawasan; fasilitasi pengembangan PERDES
7. Penguatan Legislasi dan Regulasi
8. Penerapan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Pengelolaan Lingkungan
9. Mitigasi bencana, pencemaran dan dampak perubahan iklim.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Renja adalah untuk memfokuskan arah perencanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan lainnya agar terjadi sinergi dan sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah: Sesuai IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah dapat dilihat pada tabel dibawah;

Tabel 57. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023

Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	2023	Usulan Perubahan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Perikanan	100,8	100,8
Meningkatnya perekonomian kelautan dan perikanan	Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	58,77	58,77
Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	19.98	19.98
peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing	Produksi Perikanan (ton)	1.516.768,98	972.693,75
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP	Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari Operasi)	250	250
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik	Capaian SAKIP	BB	BB

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mengusulkan untuk dilakukan perubahan target produksi perikanan dimana produksi perikanan terutama perikanan budidaya didominasi oleh budidaya rumput laut. Rumput laut Sulawesi Tengah sebagian besar berasal dari Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan dimana melihat kondisi lapangan produksi rumput laut di Kabupaten penyuplai terbesar beberapa tahun belakangan cenderung menurun disebabkan degradasi lingkungan dan cuaca yang kurang mendukung.

3.3 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 diarahkan sesuai dengan Renstra KKP 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 serta RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, dimana terdapat beberapa program yang diharapkan dapat menjadi unggulan Sulawesi Tengah di tahun-tahun mendatang. Pengembangan komoditas kelautan dan perikanan terbagi atas (A) Komoditas Industrialisasi: (1) Rumput Laut : (a) *Euchema cottonii*, (b) *Gracillaria sp*, (2) Tuna Tongkol Cakalang, (3) Udang, (4) Ikan Demersal, (5) Sidat dan (B) Komoditas Ketahanan Pangan antara lain (1) Lele, (2) Nila, (3) Mas, (4) Pelagis Kecil.

Berikut Rencana Pengembangan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Tengah:

A. Pengembangan Rumput Laut

Potensi areal budidaya rumput laut sebesar 540.012 Ha, sedang lahan tambak sebesar 42.095 Ha. Dominasi produksi yang cukup besar terdapat pada pengembangan komoditi rumput laut, yaitu *Euchema Cottoni* yang banyak diusahakan pada budidaya laut dan *Glacillaria sp* yang diusahakan pada budidaya tambak.

Guna mendukung pengembangan rumput laut di Sulawesi Tengah, pada tahun 2019, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kerjasama dengan SEOMEO BIOTROP dalam melakukan pengembangan Rumput Laut Teknologi Kultur Jaringan di Sulawesi Tengah dimana permasalahan rumput laut di Sulawesi Tengah yaitu (1) Tingginya

fluktuasi harga sehingga belum menjadi usaha pokok; (2) Rendahnya produktifitas dan mutu rumput laut, karena masih menggantungkan bibit yang diperoleh secara vegetatif dari kawasan budidaya sekitarnya; (3) Jumlah kebun bibit yang terbatas; (4) Belum diproduksi dengan cara modern melalui kebun bibit yang asal induknya hasil kultur jaringan; (5) Penyediaan bibit dipengaruhi musim; dan (6) Perbanyak bibit secara vegetatif terus menerus menyebabkan pertumbuhan lambat, mudah terkena penyakit serta kandungan karaginan rendah. Metode ini dipilih karena dapat memproduksi bibit rumput laut dalam skala besar. Tidak dipengaruhi musim karena dilakukan di laboratorium, bibit yang dihasilkan memiliki sifat yang identik dengan induknya, tidak memerlukan tempat yang luas dan kesehatan dan mutu bibit yang dihasilkan lebih terjamin.

B. Pengembangan Tuna, Tongkol dan Cakalang dan Pelagis Kecil

Industrialisasi Tuna, Tongkol, Cakalang dan Pelagis Kecil Dilakukan dalam mendukung peningkatan devisa dan ketahanan pangan nasional, dilakukan melalui perkuatan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). Produksi Tuna, Tongkol dan Cakalang tahun 2021 sebesar 45.892,75 ton; sedangkan pelagis kecil = 66.904,75 ton. Strategis Industrialiasasi sebagai berikut: (1) peningkatan SDM pelaku usaha penguasaan IPTEK; (2) penataan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/pangkalan pendaratan ikan (PPI); (3) rencana pengembangan karamba tuna; (4) pengembangan kawasan minapolitan tangkap pada PPI Donggala; PPI Pagimana dan Outer Ring Fishing Port Ogotua; (5) pemberdayaan nelayan skala 3-10 GT untuk Tuna/Cakalang; (6) restrukturisasi armada secara bertahap hingga 15-20 GT dan >30 GT; (7) pengembangan industri pengolahan (*processing and canning*) berbasis *zero waste*; (8) pengembangan industri penunjang (kapal fiberglass; dan alat tangkap ikan).

C. Pengembangan Udang

Potensi lahan tambak berkisar 54.812 Ha; namun pemanfaatannya baru sekitar 28,32%. Produksi udang tahun 2021 sebanyak 50.485,02 ton, didominasi Udang Windu (*P. Monodon*) dari tambak rakyat. Kawasan pertambakan di Sulawesi Tengah mempunyai ciri khas: (a) tidak berada dalam satu kawasan luas; namun berkisar 100-200 Ha; (b) jarak antar kawasan relatif jauh, berkisar 3-5 km; (c) sumberdaya iar yang masih alami. Kondisi ini sangat ideal untuk pertambakan supra intensif; mengingat kecilnya potensi penyebaran penyakit secara horisontal. Strategis Industrialiasasi sebagai berikut: (1) peningkatan SDM dan penguasaan IPTEK pelaku usaha; (2) pengembangan coldstorage, hatchery dan pabrik pakan; (3) pengembangan tambak rakyat dengan komoditas Udang Windu, serta polikultur dengan bandeng dan *Gracilaria sp* melalui: (a) penguatan BBU dan produksi benih unggul; (b) revitalisasi konstruksi dan saluran tambak, (c) stimulan permodalan kerja, (d) pendampingan teknis budidaya; dan (4) Pengembangan Tambak Supra Intensif dengan komoditas Udang Vaname (*L. Vannamei*) melalui: (a) penggunaan teknologi yang efisien ramah lingkungan dan (b) tax holiday bagi pengembangan investasi.

D. Pengembangan Ikan Demersal

Produksi Ikan Demersal didominasi oleh *Red Snapper*, *Baramundi*, *Grouper*, *Giant Seaperch*, *Yellowtail Fusilier*, *Black and Silver Pomfret* dan *Goat-Fist*. Produksi tahun 2021 sebesar 52.312,30 ton. Pasar Ikan Dermersal, terutama Kerapu Hidup adalah Jepang, Singapura, Hongkong, Cina dan Taiwan sedangkan bentuk forzen dikirim Ke Eropa dan Amerika. Pabrik-pabrik Pengolahan (*Processing Plant*) berorientasi ekspor umumnya berada di daerah kabupaten Banggai.

Pengembangan Ikan Demersal akan diintegrasikan dengan *Sea Ranching* berbasis Rumah Ikan (*Fish Home*). *Fish Home* adalah terumbu karang buatan (*artificial reef*), berfungsi sebagai: (a) alat pengumpul; (b) tempat reproduksi ikan, serta (c) rehabilitasi ekosistem laut. Tujuan pembangunan *Fish Home* sebagai upaya konservasi, produksi; dan secara tidak langsung menjaga ketersediaan *food chain* bagi Tuna dan pelagis besar. *Sea Ranching* merupakan kegiatan terintegrasi antara bidang perikanan tangkap, budidaya, kelautan dan pengawasan. Strategi Industrialiasasi sebagai berikut; (1) Peningkatan SDM untuk penguasaan IPTEK, (2) Penyiapan ekosistem berupa pembangunan *Fish Home*, (3) penyiapan kelembagaan masyarakat; (4) restocking ikan ekonomis penting non ruaya pada kawasan *Fish Home*; (5) penyiapan aturan main pengolahan kawasan dan (6) peningkatan peran swasta khususnya eksportir ikan demersal dalam tata kelola *Fish Home*.

E. Pengembangan Ikan Air Tawar

Pengembangan ikan air tawar lebih diarahkan pada upaya peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan konsumsi akan. Produksi tahun 2021 sebesar 5.620,6 ton. Strategis Industrialiasasi sebagai berikut: (1) Pengembangan BBI dan Sentral Budidaya Ikan Air Tawar pada kolam, tambak marginal, Perairan Umum Daratan serta disekitar kawasan perkebunan dan pertambangan, fokus pada ikan mas, dan nila; (2) kerjasama pengembangan Budidaya Ikan Hemat Air di pekarangan rumah antara lain dengan penggunaan bioflok; melibatkan ORMAS, antara lain Organisasi Wanita, Pemuda dan Persatuan Wredatama, fokus pada ikan lele, nila, dan mas; (3) Kampanye GEMARIKAN dan lomba diversifikasi produk perikanan.

3.4 Pendanaan Program dan Kegiatan 2022 dan Rencana 2023

Tabel 58. Pendanaan Program dan Kegiatan 2022 dan Rencana 2023

PROGRAM/KEGIATAN	Pagu		
	2022	2023	2023 Devinitif
SESUAI KEPMENDAGRI NO 050-5889 TAHUN 2020			
SEKRETARIAT	22.582.624.321	21.096.304.377	22.709.297.500
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.582.624.321	21.096.304.377	22.709.297.500
a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.085.275.750	610.414.334	726.709.000
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.273.821.058		18.384.849.526
b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	165.607.000	17.622.380.972	
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	975.117.475	699.309.777	1.067.203.402
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	151.350.000	100.308.000	169.943.000
a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.720.248.838	1.284.277.400	1.390.373.532
b. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.211.204.200	779.613.894	970.219.040
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA & P2HP	9.630.811.161		
2 Pengelolaan Perikanan Budidaya	7.133.766.079	3.345.826.439	8.122.201.131

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2023

a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		30.000.000	
b. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		20.000.000	
c. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	7.133.766.079	1.230.000.000	1.624.510.056
d. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		2.065.826.439	6.497.691.075
4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.497.045.240	1.618.148.281	3.774.849.029
a. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	239.419.028	139.001.387	108.998.000
b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	871.629.587	450.834.980	613.231.179
c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.385.996.625	1.028.311.914	3.052.619.850
BIDANG PERIKANAN TANGKAP	39.060.826.500	19.392.509.446	34.606.881.810
3 Pengelolaan Perikanan Tangkap	39.060.826.500	19.392.509.446	34.606.881.810
a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	23.693.777.500	15.636.803.388	15.550.208.330
b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		153.554.575	
c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT		42.067.924	587.323.600
d. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	15.367.049.000	3.560.083.559	18.469.349.880
BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT	6.121.197.000	2.556.815.586	4.601.986.000
5 Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		2.556.815.586	4.601.986.000
a. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	5.312.172.000	1.922.400.000	4.113.713.000
b. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	509.382.000	300.000.000	223.852.000
c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	299.643.000	334.415.586	264.421.000
BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.920.972.925	5.009.649.564	5.238.006.240
6 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	5.920.972.925	5.009.649.564	5.238.006.240
a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	5.750.572.925	4.919.649.564	5.064.886.240
b. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	170.400.000	90.000.000	173.120.000

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2023

UPT. PMHP	821.531.475	1.330.103.531	1.130.026.312
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.455.761	730.103.531	730.067.057
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		175.680.000	160.899.000
b. Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.840.721	55.336.007	49.440.907
c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.775.040	426.257.590	430.457.590
d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.840.000	72.829.934	89.269.560
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	564.075.714	600.000.000	399.959.255
a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	564.075.714	300.000.000	399.959.255
b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		300.000.000	
UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN	2.808.557.588	3.479.289.930	4.187.407.715
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	640.894.588	2.079.289.930	1.557.159.315
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		410.400.000	81.720.000
b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	72.849.000	52.357.800	72.420.000
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.993.580	64.320.210	50.544.614
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.212.008	1.275.500.000	1.314.924.701
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.840.000	276.711.920	37.550.000
Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.167.663.000	1.400.000.000	2.630.248.400
a. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		100.000.000	
b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	2.167.663.000	1.300.000.000	2.630.248.400
UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I	2.482.382.300	2.920.580.734	2.716.780.612
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.621.915.500	2.350.580.734	2.163.205.786
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78.360.000	272.520.000	149.902.450
b. Administrasi Kepegawaian		31.069.584	25.563.600
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.793.800	77.545.600	85.420.082
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.365.471.700	1.876.000.000	1.792.024.104
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.290.000	93.445.550	110.295.550
Pengelolaan Perikanan Tangkap	860.466.800	570.000.000	553.574.826
a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	427.457.800	220.000.000	177.128.034
b. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	433.009.000	350.000.000	376.446.792

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2023

UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II	1.025.757.829	1.548.951.799	1.243.951.736
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	926.152.129	728.951.799	801.304.394
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		142.560.000	184.192.606
b. Administrasi Kepegawaian		64.062.924	50.084.190
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah		15.072.275	13.992.185
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.538.000		
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536.064.129	402.850.000	435.126.663
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.550.000	104.406.600	117.908.750
Pengelolaan Perikanan Tangkap	99.605.700	820.000.000	442.647.342
a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	56.177.550	370.000.000	128.719.962
b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
c. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	43.428.150	450.000.000	313.927.380
UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III	1.274.228.810	1.740.718.674	1.740.718.992
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.156.766.310	1.170.718.674	194.119.452
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64.560.000	157.281.930	145.211.493
b. Administrasi Kepegawaian			
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.086.950	29.267.700	37.530.559
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	970.839.360	879.713.894	891.277.400
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.280.000	104.455.150	120.100.000
Pengelolaan Perikanan Tangkap	117.462.500	570.000.000	546.599.540
a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		220.000.000	219.921.000
b. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	117.462.500	350.000.000	326.678.540
UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV	1.062.279.973	1.267.079.328	1.235.636.505
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.003.908	667.079.328	667.877.623
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	106.450.000	99.912.000	99.871.900
b. Administrasi Kepegawaian			
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.963.908	44.009.242	44.004.116
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2023

e.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.260.000	383.200.000	383.038.825
f.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.330.000	139.958.086	140.962.782
Pengelolaan Perikanan Tangkap	457.276.065	590.00.000	567.758.882
a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	199.406.500	320.000.000	300.105.595
b. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	257.869.565	270.000.000	267.653.287
UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TELUK TOMINI	210.846.150	500.000.000	394.953.368
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.157.250	233.100.000	160.295.969
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.600.000	50.000.000	30.000.000
b. Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.557.250	50.000.000	39.751.302
c.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		78.200.000	78.200.000
d.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		24.900.000	12.344.667
e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		30.000.000	
Pengelolaan Kelautan. Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	138.688.900	266.900.000	234.657.399
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		156.900.000	119.990.000
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	138.688.900	110.000.000	114.667.399
UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DOBOTO	327.856.225	530.000.000	491.680.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.076.225	263.100.000	160.490.000
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		50.000.000	44.760.000
b. Administrasi Umum Perangkat Daerah		80.000.000	23.800.000
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		30.000.000	
d.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.076.225	78.200.000	60.000.000
e.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		24.900.000	31.930.000
Pengelolaan Kelautan. Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	229.780.000	266.900.000	331.190.000
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	134.380.000	156.900.000	191.190.000
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	95.400.000	110.000.000	140.000.000
UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BANGGAI	278.581.025	500.000.000	389.870.625
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.190.025	233.100.000	179.681.625
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		50.000.000	
b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		30.000.000	

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2023

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.290.025	50.000.000	98.981.625
c.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.900.000	78,200.000	80.700.000
d.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		24.900.000	
Pengelolaan Kelautan. Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	209.391.000	325.000.000	210.189.000
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	209.391.000	175.000.000	210.189.000
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		100.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		50.000.000	
UPT. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali	305.932.238	500.000.000	390.650.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.509.315	233.100.000	160.650.000
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		50.000.000	30.000.000
b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		30.000.000	
	54.600.000		
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.909.315	50.000.000	40.000.000
c.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		78.200.000	78.200.000
d.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		24.900.000	12.450.000
Pengelolaan Kelautan. Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	217.422.923	266.900.000	230.000.000
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	170.672.923	156.900.000	120.000.000
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	46.750.000		
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		110.000.000	110.000.000
JUMLAH	65.215.191.879	67.325.977.689	92.974.897.575

3.5 FOKUS UTAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

3.5.1 Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pengelolaan administrasi program, keuangan, asset, kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas dengan fungsi : (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja. pengelolaan administrasi keuangan. asset. kepegawaian dan umum; (b) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja. pengelolaan administrasi keuangan. asset. kepegawaian dan umum; (c) Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan. asset. kepegawaian. rumah tangga dan umum; (d) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan. asset. kepegawaian. rumah tangga dan umum; (e) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan. asset. kepegawaian. rumah tangga dan umum; (f) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan

kesekretariatan; dan (g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Fokus pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat pada tahun anggaran 2023 adalah diarahkan pada Penyusunan Ranperda terkait Kewenangan Urusan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, penataan lingkungan kantor, Sinkronisasi dan Monitoring Evaluasi Program/Kegiatan, pelaporan keuangan berbasis akrual dan sinkronisasi asset. dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan administrasi keuangan. kepegawaian dan perkantoran lainnya.

3.5.2 Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dengan fungsi : (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; (b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; (c) Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dengan pihak dan unit terkait; (d) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; (e) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; (f) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; dan (g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Tangkap.

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang perikanan tangkap pada tahun anggaran 2023 difokuskan pada : (a) penyediaan dan rehabilitasi infrastruktur pelabuhan dimana terdapat beberapa pelabuhan perikanan yang akan dikembangkan dan direhabilitasi antara lain: Pengembangan PPI Donggala melalui Dana DAK dimana telah diusulkan pembangunan penahan gelombang, turap penahan tanah, dermaga, kolam pelabuhan, drainase, TPI Hiegenis, Fasilitas Air (tawar) Bersih, Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo), Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Peralatan dan Mesin Penunjang Pendataan dan Penangkapan Ikan Terukur serta Pembuatan DED PPI Lafeu; (b) pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui perbaikan sistem data serta kegiatan restocking pada Perairan Umum Daratan (PUD); (c) Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap termasuk dalam rangka pengentasan

kemiskinan dan peningkatan produktifitas perikanan tangkap (antara lain melalui Program *Smart Fishing*); (d) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program perikanan tangkap; (e) koordinasi dengan stakeholder terkait permasalahan perikanan tangkap (antara lain : ketersediaan BBM, kondisi cuaca, perijinan); (f) pelayanan kepelabuhanan; dan (g) dukungan administrasi pelaksanaan program kegiatan perikanan tangkap. Dalam pelaksanaan sampai dengan triwulan I tahun 2023, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum maksimal pelaksanaannya disebabkan keterbatasan anggaran dan besarnya kebutuhan diantaranya dalam rangka program pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktifitas perikanan tangkap.

3.5.3 Perikanan Budidaya dan P2HP

Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP bertugas membantu kepala dinas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dalam menyelenggarakan fungsi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan fungsi: (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (c) Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan pihak dan unit terkait; (d) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (e) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (f) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang pengembangan Usaha Budidaya. Logistik Hasil Perikanan. pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan (h) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP.

Fokus kegiatan bidang perikanan budidaya dan P2HP tahun 2023 adalah (1) pengelolaan dan pemuktahiran basis data kegiatan pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, termasuk didalamnya kegiatan perijinan; (2) Pengembangan Rumput Laut Kultur Jaringan; (3) Pengembangan budidaya ikan air tawar melalui inovasi-inovasi, antara lain melalui penerapan bioflok; (4) Program Bantuan Sarana Produksi Perikanan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktifitas; (5) Dukungan Peningkatan Infrastruktur UPT Perbenihan; (6) Peningkatan Pemantauan dan Pengendalian Hama dan Kesehatan Ikan; (7) Peningkatan

Kapasitas Pokdakan Budidaya melalui CBIB dan CPIB; (8) Dukungan Keamanan Pangan Hasil Perikanan; (9) Penguatan Kelembagaan Poklhasar dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Olahan Hasil Perikanan; (10) Penyediaan sarana CCS Pendukung Produksi; (11) Penyediaan Pabrik Es terutama pada PPI Paranggi; (12) Penyediaan Cold Storage ABF; (13) Peningkatan Fasilitasi SKP dan Ekspor Hasil Perikanan; dan (14) Kampanye Gemarikan.

Dalam pelaksanaan sampai dengan triwulan I tahun 2023, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum maksimal pelaksanaannya disebabkan keterbatasan anggaran dan besarnya kebutuhan diantaranya dalam rangka program pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktifitas perikanan budidaya terutama budidaya rumput laut.

3.5.4 Pengelolaan Ruang Laut

Tugas bidang pengelolaan ruang laut adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; dengan fungsi: (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; (b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang laut dan Konservasi Ruang Laut; (c) Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut dengan pihak dan unit terkait; (d) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; (e) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; (f) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut; (g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan (h) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Ruang Laut.

Rencana fokus kegiatan tahun 2023 adalah (a) Peningkatan sarana pusat informasi pada kawasan konservasi Tomini, Morowali dan Doboto; (b) Rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu terumbu karang (Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kota Palu); mangrove (Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai); dan Pemetaan Kawasan Rehabilitasi Ekosistem (c) Revisi dan penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (d) Pembangunan Kantor Pengelola Kawasan Konservasi Morowali; (e) Pemasangan tanda batas KKP3K; (f) Sarana Prasarana Monitoring Kawasan Konservasi; (g) Monitoring biofisik dan sosek kawasan konservasi; (i) Sarana

Pemeliharaan Biota Langka; (j) Tanda Kawasan Rehabilitasi Ekosistem; (k) Peningkatan kapasitas masyarakat P3K (Banggai, Parigi Moutong, Donggala); (l) Fasilitasi kelembagaan kelompok masyarakat pesisir (Morowali, Bangkep, Banggai Laut; (m) Penerbitan rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil; (n) Pengembangan kapasitas SDM serta pelibatan dan penguatan kelembagaan.

3.5.5 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Tugas bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah membantu kepala dinas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap menyelenggarakan fungsi Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran dengan **fungsi** : (a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran; (b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran; (c) Penyiapan bahan pengkoordinasian bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP dan Penanganan Pelanggaran dengan pihak dan unit terkait; (d) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran; (e) Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran; (f) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran; (g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan (h) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.

Rencana fokus kegiatan tahun 2023 bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah (a) pelaksanaan gelar operasi; (b) pembinaan kelompok masyarakat pengawas; (c) rehabilitasi sarana prasarana pengawasan; serta (d) peningkatan SDM Pengawas.

3.5.6 UPTD Balai Perbenihan Perikanan

UPT Perbenihan Perikanan memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas, di bidang Perbenihan Perikanan dengan fungsi : (a) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT Perbenihan Perikanan; (b) Melaksanakan pelayanan dan pengkajian teknologi dibidang Perbenihan dan Budidaya Perikanan; (c) Melaksanakan tugas teknis operasional/penunjang dinas di bidang Perbenihan perikanan; (d) Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana

dan prasarana Perbenihan perikanan; dan (e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fokus kegiatan UPT Perbenihan Perikanan tahun 2023 adalah (1) perikanan tawar fokus pada komoditas ketahanan pangan: (a) Mas (b) Nila dan (c) Lele dengan cara perbaikan mutu induk dan benih antara lain melalui perbanyak induk ikan air tawar, teknologi produksi massal benih di BBIS Tulo dan Kalawara dan penerapan teknologi budidaya di unit perbenihan; (2) perikanan payau pada komoditas udang vanname dengan: peningkatan kualitas benih dan produksi udang vaname pada Instalasi Mamboro. BBIP Kampal dan Tambak Tindaki.

3.5.7 UPTD PMHP

Mempunyai tugas sebagai unsur penunjang sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pembinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan; (2) Pelaksanaan Tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan; (3) Pelaksanaan Pelayanan Tugas teknis administrasi ketatausahaan pada UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan; (4) Melaksanakan Pembangunan. Pengembangan. Pemeliharaan. pendayagunaan dan Pengawasan dan Pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan; (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fokus kegiatan UPTD PMHP tahun 2023 adalah (a) Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai standar; (b) Pembinaan penerapan GMP dan SSOP bagi "Poklahsar"; (c) Monitoring penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan; (d) Penerapan mutu dan bimtek yang memenuhi SNI; (e) inovasi pengolahan produk hasil perikanan; dan (f) peningkatan kapasitas SDM Aparatur.

3.5.8 UPTD Wilayah I. II. III. IV

- 1) UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I; dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Donggala. Kota Palu. Kabupaten Toli Toli dan Kabupaten Buol;
- 2) UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II; dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Parigi Moutong. Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una Una;
- 3) UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III; dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Banggai. Banggai Kepulauan. dan Kabupaten Laut;
- 4) UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah IV; dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara.

Tugas UPT Wilayah adalah melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas. di bidang Pelabuhan Perikanan dengan fungsi: (1) melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT Kelautan dan Pelabuhan

Perikanan; (2) Melaksanakan pengendalian tatakelola dan pemanfaatan ruang laut dan pelabuhan perikanan di wilayah kerjanya (3) Melaksanakan pembinaan kelompok masyarakat pengawas dan pemerhati lingkungan di wilayah kerjanya; (4) Melaksanakan kaji terap teknologi konservasi kelautan berbasis lokalitas wilayah kerjanya; (5) Melaksanakan tata kelola dan pelayanan usaha serta kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan; (6) Melaksanakan tugas teknis operasional/penunjang dinas di bidang kelautan dan pelabuhan perikanan; (7) Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana dibidang kelautan dan pelabuhan perikanan; serta (8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fokus kegiatan tahun 2023 UPT Wilayah adalah:

- Peningkatan SDM Aparatur
- Peningkatan pelayanan kepelabuhanan
- Dukungan operasional dan administrasi pelabuhan perikanan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana serta infrastruktur Pelabuhan Perikanan Donggala, Ogotua, Paranggi, Kolonedale, Pagimana, Salakan dan Mato.

3.5.9. UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas sebagai unsur penunjang sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terdiri dari 4 (empat) lokasi yaitu. UPT KKP3K Banggai (meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut); UPT KKP3K Morowali (meliputi Kabupaten Morowali dan Morowali Utara; UPT KKP3K Doboto (meliputi Kabupaten Donggala, Buol dan Tolitoli); dan UPT KKP3K Teluk Tomini (meliputi Kabupaten Parigi Moutong, Poso dan Tojo Una-una).

Fokus kegiatan tahun 2023 UPT adalah:

- Peningkatan SDM Aparatur
- Dukungan operasional dan administrasi UPT KP3K
- Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi

BAB IV PENUTUP

Pembangunan Kelautan dan Perikanan belakangan ini mendapat perhatian yang cukup besar baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan antara lain: (1) terbatasnya BBM bersubsidi, pupuk, pakan dan benih berkualitas (2) kelistrikan; (3) moda transportasi; (4) prasarana jalan; (5) lemahnya SDM perikanan; (6) terbatasnya sarana produksi perikanan; (7) penurunan kualitas lingkungan; (8) masih terbatasnya anggaran yang mendukung sektor kelautan dan perikanan.

Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maupun dengan stakeholder terkait dimana sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktifitas.

Akhirnya, keberhasilan kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan tidak terlepas dari sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin penyelenggara/aparat serta peran aktif masyarakat untuk saling bekerjasama dalam mensukseskan tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan/program untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Demikian pula indikator dan target kinerja dapat dipahami secara utuh yang pada akhirnya segenap kemampuan yang ada dapat diarahkan untuk peningkatan secara keseluruhan.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2023

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2023			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
Memajukan dan mensejahterahkan pelaku usaha kelautan dan perikanan berbasis pengelolaan SDKP yang berkeadilan dan berkelanjutan					PDRB Perikanan		5.07			Dislutkan	Sulteng
					Penurunan jumlah Rumah Tangga Miskin Kelautan dan Perikanan (%)		3%				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)		64 Indeks	21,096,304,377		Palu
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun (dokumen)		3 dokumen	610,414,334		Palu
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)		2 Dokumen	300,910,334		Palu
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dok)		1 Dokumen	309,504,000		Palu
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1 laporan	17,622,380,972		Palu
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)		1 Org/ Bulan	16,962,068,972		Palu

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023			
							Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1 Dokumen	588,744,000		Palu
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (laporan)		1 Laporan	26,304,000		Palu
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	29,160,000		Palu
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)		1 Laporan	16,104,000		Palu
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)		1 dokumen	100,308,000		Palu
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)		160 paket	58,665,000		Palu
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (org)		3 Orang	41,643,000		Palu
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1 laporan	699,309,777		Palu
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1 paket	490,679,739		Palu
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		1 paket	113,629,538		Palu

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2023			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)		1 Laporan	95,000,500		Palu
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 laporan	1,284,277,400		Palu
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)		1 Laporan	54,077,400		Palu
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1 Laporan	618,800,000		Palu
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1 Laporan	611,400,000		Palu
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 laporan	779,613,894		Palu
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)		48 Unit	364,884,000		Palu
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		48 Unit	181,948,450		Palu
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)		3 Unit	232,781,444		Palu
	Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan					rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial		19.98			11 kab/1 kota
					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		100 %	2,556,815,586		11 kab/1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2023			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		65 %	1,922,400,000		11 kab/ 1 kota
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen RZWP3K/ Review RZWP3K yang tersusun (buah)		1.00	366,900,000		11 kab/ 1 kota
			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas kawasan konservasi perairan yang dicadangkan (Ha)		528,757	800,000,000		4 KKP
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Peningkatan wilayah pesisir dan PPK yang terehabilitasi (%)		3,697	655,500,000		11 kab/ 1 kota
			Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kegiatan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terlaksana (buah)		50	100,000,000		11 kab/ 1 kota
			Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi yang difasilitasi (%)		100	300,000,000		11 kab/ 1 kota
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang difasilitasi (%)		1.00	50,000,000		11 kab/ 1 kota
			Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang difasilitasi (dok)		1.00	100,000,000		11 kab/ 1 kota
			Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah fasilitasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Asing yang difasilitasi (dok)		1.00	50,000,000		11 kab/ 1 kota
			Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah penerbitan rekomendasi izin pelaksanaan reklamasi di daerah pesisir yang difasilitasi (dok)		1.00	50,000,000		11 kab/ 1 kota
			Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah pencatatan dan pengadministrasian dalam sistem kadaster laut (dok)		1.00	50,000,000		11 kab/ 1 kota
			Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)		100	334,415,586		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023			
							Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat yang terbina di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (kelompok)		80.00	100,000,000		11 kab/ 1 kota
				Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat pesisir yang difasilitasi kelembagaannya (%)		1.00	100,000,000		11 kab/ 1 kota
				Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah pelibatan kelompok Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		80.00	90,000,000		11 kab/ 1 kota
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan	Jumlah Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan		1.00	44,415,586		11 kab/ 1 kota
	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan				Nilai Tukar Nelayan		102.00			12 kab/ 1 kota
	peningkatan produksi sumberdaya kelautan dan				Nilai Tukar Perikanan		4.17			12 kab/ 1 kota
					Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)		57.05			12 kab/ 1 kota
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (ton)		252,693.75	19,392,509,446		12 kab/ 1 kota
					Nilai Tukar Nelayan		102.00			12 kab/ 1 kota
				<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)		< 50%	15,636,803,388		11 kab/ 1 kota
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)		12 Dokumen	589,312,905		11 kab/ 1 kota
					Produksi perikanan kelompok nelayan (Kg)		682273,1277 kg			11 kab/ 1 kota
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)		1 Unit	173,682,859		11 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023			
							Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)		200 unit	14,873,807,624		11 kab/ 1 kota
					Persentase bina kelompok nelayan (%)		67.77			11 kab/ 1 kota
				<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	Produksi Perikanan PUD (ton)		3.011,46 ton	153,554,575		5 kabupaten
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)		5 Dokumen	153,554,575		5 kabupaten
				<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT</i>	Persentase penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang difasilitasi (%)		100 %	42,067,924		11 kab/ 1 kota
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persentase Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang tersedia (%)		1 Dokumen	42,067,924		11 kab/ 1 kota
				<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan (lokasi)		8 Lokasi	3,560,083,559		11 Kab
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)		2 unit	3,560,083,559		11 Kab
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)		1,264,075.23	3,345,826,439		12 kab/ 1 kota
					Nilai Tukar Pembudidaya Ikan		100.50			12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023			
							Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang difasilitasi (%)</i>		100.00	30,000,000		
				Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)		1 Rekomendasi	30,000,000		12 kab/ 1 kota
				<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</i>	<i>Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</i>		100 %	20,000,000		12 kab/ 1 kota
				Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)		1 Rekomendasi	20,000,000		12 kab/ 1 kota
				<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)		12 kawasan	1,230,000,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		1 Dokumen	300,000,000		11 kab/ 1 kota
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)		3 Unit	300,000,000		13 Kab
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)		40 Unit	600,000,000		12 kab/ 1 kota
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)		1 Dokumen	30,000,000		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023			
							Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</i>	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)		13 kawasan	2,065,826,439		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)		8 Unit	1,200,000,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak		50 Unit	865,826,439		12 kab/ 1 kota
	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta regulasi-deregulasi terkait pengelolaan SDKP			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Perikanan Olahan (Kg)		6,535,950.00	1,618,148,281		12 kab/ 1 kota
					Nilai pembiayaan usaha perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp.juta,-)		900,000.00			12 kab/ 1 kota
				<i>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	Persentase izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi (%)		100.00	139,001,387		12 kab/ 1 kota
				Penetapan persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi (Rekomendasi)		1 Rekomendasi	50,000,000		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2023			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)		1 Dokumen	89,001,387		12 kab/ 1 kota
					<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanan (unit)		15.00	450,834,980		12 kab/ 1 kota
						Jumlah SKP yang difasilitasi (buah)		58.00			12 kab/ 1 kota
					Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing (unit usaha)		20 unit usaha	450,834,980		12 kab/ 1 kota
					<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	Persentase bahan baku yang memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan provinsi (%)		60.00	1,028,311,914		12 kab/ 1 kota
					Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (dokumen)		1.00	30,216,000		12 kab/ 1 kota
					Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi (unit usaha)		1.00	908,095,914		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2023			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir (Dokumen)		1.00	90,000,000		12 kab/ 1 kota
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana KP yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan melalui penerapan sanksi administrasi & Sanksi Pidana (%)		0.40	5,009,649,564		12 kab/ 1 kota
			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengawas Perikanan, PPNS dan Polsus Perikanan yang difasilitasi dan berkompentensi mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (orang)		35 Orang	4,919,649,564		12 kab/ 1 kota
			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)		1 Dokumen	691,452,184		11 kab/ 1 kota
				Jumlah Pemanfaat Kawasan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya (unit)		15 Unit			11 kab/ 1 kota
			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil (Dokumen)		1 Dokumen	3,035,732,243		11 kab/ 1 kota
				Jumlah Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya (unit)		250 Unit			11 kab/ 1 kota
			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)		1 Dokumen	592,465,137		11 kab/ 1 kota
				Jumlah Unit Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diperiksa Kepatuhannya (unit)		20 unit			11 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023			
							Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif (Kelompok)		30 Kelompok	600,000,000		11 kab/ 1 kota
					Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibina (kelompok)		30 Kelompok			11 kab/ 1 kota
				<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di wilayah PUD (Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya) yang terbina (kelompok)		5 Kelompok	90,000,000		11 kab/ 1 kota
				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya (dokumen)		1 Dokumen	30,000,000		11 kab/ 1 kota
					Jumlah Unit Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diperiksa kepatuhannya (unit)		15 Unit			11 kab/ 1 kota
				Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)		1 Dokumen	30,000,000		11 kab/ 1 kota
					Jumlah Unit Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang diperiksa kepatuhannya (Unit)		5 Unit			11 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2023			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)		1 Dokumen	30,000,000		11 kab/ 1 kota
				Jumlah Unit Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (pelaku usaha)		4 Pelaku Usaha			11 kab/ 1 kota
			UPT. BALAI PERBENIHAN PERIKANAN				3,479,289,930		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)		64 Indeks	2,079,289,930		12 kab/ 1 kota
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1 laporan	410,400,000		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1 Dokumen	410,400,000		12 kab/ 1 kota
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi BMD (laporan)		1 laporan	52,357,800		12 kab/ 1 kota
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)		1 Laporan	52,357,800		12 kab/ 1 kota
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1 laporan	64,320,210		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1 paket	64,320,210		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 laporan	1,275,500,000		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2023				
						Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1 Laporan	591,500,000		12 kab/ 1 kota	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1 Laporan	684,000,000		12 kab/ 1 kota	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 laporan	276,711,920		12 kab/ 1 kota	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)		13 Unit	34,830,000		12 kab/ 1 kota	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)		2 Unit	241,881,920		12 kab/ 1 kota	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1,400,000,000		
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kawasan pembudidayaan yang dikelola (kawasan)		1 kawasan	100,000,000		1 KKP	
				Jumlah Calon Induk Unggul (Ekor)						1 KKP
				Jumlah produksi ikan dan udang konsumsi (Kg)						1 KKP
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)		1 Unit	30,000,000		1 KKP	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)		1 Unit	50,000,000		1 KKP	
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)		1 Dokumen	20,000,000		1 KKP	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Calon Induk Unggul (Ekor)		800 ekor	1,300,000,000		1 KKP	
				Jumlah produksi ikan dan udang konsumsi (Kg)			31300 kg		1 KKP	

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023			
							Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		6 Unit	1,000,000,000		1 KKP
				Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		3 Unit	300,000,000		1 KKP
				UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)				1,330,103,531		1 KKP
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)		64 Indeks	730,103,531		12 kab/ 1 kota
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1 laporan	175,680,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1 Dokumen	175,680,000		12 kab/ 1 kota
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1 laporan	55,336,007		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1 paket	19,726,457		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		1 paket	5,579,550		12 kab/ 1 kota
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)		1 Laporan	30,030,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 laporan	426,257,590		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2023			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1 Laporan	118,300,000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)		1 Laporan	28,957,590		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1 Laporan	279,000,000		12 kab/ 1 kota
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 laporan	72,829,934		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)		9 Unit	72,829,934		12 kab/ 1 kota
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanannya (unit)		8 unit	600,000,000		1 KKP
					Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)		4 unit usaha	300,000,000		1 KKP
					Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka		4 unit usaha	300,000,000		1 KKP
					UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I				2,920,580,734		1 KKP
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)		64 Indeks	2,350,580,734		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023			
							Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1 laporan	272,520,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1 Dokumen	272,520,000		12 kab/ 1 kota
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)		1 dokumen	31,069,584		12 kab/ 1 kota
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)		1 Orang	31,069,584		12 kab/ 1 kota
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1 laporan	77,545,600		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1 paket	77,545,600		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 laporan	1,876,000,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1 Laporan	1,456,000,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1 Laporan	420,000,000		12 kab/ 1 kota
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 Laporan	93,445,550		12 kab/ 1 kota
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		7 Unit	93,445,550		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023			
							Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah I (kg)		3,858,750	570,000,000		1 KKP
					PAD Pelabuhan Wilayah I (Rp.1.000)		2,200,000			1 KKP
				<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil I)		2.500 SPB	220,000,000		1 KKP
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)		1 Dokumen	20,000,000		1 KKP
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)		1 Unit	200,000,000		1 KKP
				<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah I (pelabuhan)		2 Pelabuhan	350,000,000		1 KKP
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah I (balok)		155.151 balok	300,000,000		1 KKP
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)		6 Unit			1 KKP
				Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)		8 Layanan	50,000,000		1 KKP
				UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II				1,548,951,799		1 KKP
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)		64 Indeks	728,951,799		12 kab/ 1 kota
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1 laporan	142,560,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1 Dokumen	142,560,000		12 kab/ 1 kota
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)		1 dokumen	64,062,924		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2023			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)		1 Dokumen	64,062,924		12 kab/ 1 kota
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1 laporan	15,072,275		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		1 paket	15,072,275		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 laporan	402,850,000		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1 Laporan	159,250,000		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1 Laporan	243,600,000		12 kab/ 1 kota
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 laporan	104,406,600		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)		6 Unit	13,920,000		12 kab/ 1 kota
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)		3 Unit	90,486,600		12 kab/ 1 kota
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah II (Kg)		1,832,340	820,000,000		1 KKP
				PAD Pelabuhan Wilayah II (Rp.1000)		122,004			1 KKP
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil II)		785 SPB	370,000,000		1 KKP
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)		1 Dokumen	20,000,000		1 KKP
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)		2 Unit	350,000,000		1 KKP

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023			
							Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah II (pelabuhan)		2 Pelabuhan	450,000,000		1 KKP
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah II (balok)		4200 balok	400,000,000		1 KKP
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)		6 Unit			1 KKP
				Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)		7 Layanan	50,000,000		1 KKP
				UPT. PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III				1,740,718,674		1 KKP
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)		64 Indeks	1,170,718,674		12 kab/ 1 kota
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1 laporan	157,281,930		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1 Dokumen	143,280,000		12 kab/ 1 kota
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)		1 Laporan	14,001,930		12 kab/ 1 kota
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1 laporan	29,267,700		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)		1 paket	18,900,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)		1 paket	7,337,500		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		1 paket	3,030,200		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2023			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 laporan	879,713,894		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)		1 Laporan	8,193,600		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1 Laporan	591,500,000		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)		1 Laporan	22,020,294		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1 Laporan	258,000,000		12 kab/ 1 kota
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 laporan	104,455,150		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)		2 Unit	16,932,000		12 kab/ 1 kota
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		2 Unit	45,073,150		12 kab/ 1 kota
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)		1 Unit	12,450,000		12 kab/ 1 kota
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)		1 Unit	30,000,000		12 kab/ 1 kota
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah III (Kg)		685443	570,000,000		1 KKP
				PAD Pelabuhan Wilayah III (Rp.1000)		510000			1 KKP
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah SPB (Surat Perintah Berlayar) yang diterbitkan (wil III)		135 %	220,000,000		1 KKP
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)		1 Dokumen	20,000,000		1 KKP

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023			
							Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)		1 Unit	200,000,000		1 KKP
				<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah III (pelabuhan)		2 Pelabuhan	350,000,000		1 KKP
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah III (balok)		11.900 balok	300,000,000		1 KKP
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)		6 Unit			
				Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)		7 Layanan	50,000,000		1 KKP
				UPT. PELABUHAN WILAYAH IV				1,257,079,328		1 KKP
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)		1 laporan	667,079,328		12 kab/ 1 kota
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1 dokumen	99,912,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1 laporan	99,912,000		12 kab/ 1 kota
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1 Paket	44,009,242		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1 laporan	44,009,242		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 laporan	383,200,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1 laporan	254,800,000		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2023			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1 laporan	128,400,000		12 kab/ 1 kota
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 Unit	139,958,086		12 kab/ 1 kota
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		1 Unit	127,508,086		12 kab/ 1 kota
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)			12,450,000		12 kab/ 1 kota
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Wilayah IV (Kg)		1389988	590,000,000		1 KKP
				PAD Pelabuhan Wilayah IV		206000			1 KKP
			<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	Ketersediaan syahbandar perikanan (orang)		1 orang	320,000,000		1 KKP
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)		1 Dokumen	20,000,000		1 KKP
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)		2 Unit	300,000,000		1 KKP
			<i>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	Jumlah pelabuhan yang dikelola di wilayah IV (pelabuhan)		1 Pelabuhan	270,000,000		1 KKP
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah produksi es yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha pada wilayah IV (balok)		7529 balok	220,000,000		1 KKP
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)		6 Unit			1 KKP
			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)		5 Layanan	50,000,000		1 KKP
			UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL TELUK TOMINI				500,000,000		1 KKP

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023			
							Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)		64 Indeks	233,100,000		12 kab/ 1 kota
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1 Laporan	50,000,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1 Dokumen	50,000,000		12 kab/ 1 kota
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)		1 laporan	30,000,000		12 kab/ 1 kota
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)		1 Orang	30,000,000		12 kab/ 1 kota
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1 laporan	50,000,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1 paket	30,000,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)		1 paket	10,000,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		1 paket	10,000,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 laporan	78,200,000		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2023			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1 Laporan	18,200,000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1 Laporan	60,000,000		12 kab/ 1 kota
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 Laporan	24,900,000		12 kab/ 1 kota
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		1 Unit	12,450,000		12 kab/ 1 kota
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)		1 Unit	12,450,000		12 kab/ 1 kota
					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		100 %	266,900,000		1 KKP
					<i>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		70 %	156,900,000		1 KKP
					Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)		132.189 Ha	126,900,000		1 KKP
						Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)		292.910,12 Ha			1 KKP
					Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)		3 Ha	30,000,000		1 KKP
					Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)		100 %	110,000,000		1 KKP
					Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)		10 Orang	30,000,000		1 KKP

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023			
							Target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)		1 Kelompok	40,000,000		1 KKP
				Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)		30 Orang	40,000,000		1 KKP
				UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL DOBOTO				530,000,000		1 KKP
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)		64 Indeks	263,100,000		12 kab/ 1 kota
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1 laporan	50,000,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1 Dokumen	50,000,000		12 kab/ 1 kota
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)		1 dokumen	30,000,000		12 kab/ 1 kota
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)		1 Orang	30,000,000		12 kab/ 1 kota
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1 laporan	80,000,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)		1 paket	30,000,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1 paket	30,000,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)		1 paket	10,000,000		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023			
							Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		1 paket	10,000,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 laporan	78,200,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1 Laporan	18,200,000		12 kab/ 1 kota
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1 Laporan	60,000,000		12 kab/ 1 kota
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 Laporan	24,900,000		12 kab/ 1 kota
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		1 Unit	12,450,000		12 kab/ 1 kota
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)		1 Unit	12,450,000		12 kab/ 1 kota
				PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		100 %	266,900,000		1 KKP
				<i>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		70 %	156,900,000		1 KKP
				Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)		132.189 Ha	126,900,000		1 KKP
					Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)		60.042,72 Ha			1 KKP
				Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)		3 Ha	30,000,000		1 KKP
				Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)		100 %	110,000,000		1 KKP
				Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)		10 Orang	30,000,000		1 KKP

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2023			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)		1 Kelompok	40,000,000		1 KKP
					Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)		30 Orang	40,000,000		1 KKP
					UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL MOROWALI				500,000,000		1 KKP
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)		64 Indeks	233,100,000		12 kab/ 1 kota
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (laporan)		1 Laporan	50,000,000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)		1 Dokumen	50,000,000		12 kab/ 1 kota
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)		1 dokumen	30,000,000		12 kab/ 1 kota
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (org)		1 Orang	30,000,000		12 kab/ 1 kota
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1 laporan	50,000,000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1 paket	30,000,000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)		1 paket	10,000,000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		1 paket	10,000,000		12 kab/ 1 kota
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 laporan	78,200,000		12 kab/ 1 kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2023			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		1 Laporan	18,200,000		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1 Laporan	60,000,000		12 kab/ 1 kota
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 Laporan	24,900,000		12 kab/ 1 kota
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		1 Unit	12,450,000		12 kab/ 1 kota
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)		1 Unit	12,450,000		12 kab/ 1 kota
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		100 %	266,900,000		1 KKP
			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		70 %	156,900,000		1 KKP
			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)		132.189 Ha	126,900,000		1 KKP
				Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)		292.910,12 Ha			1 KKP
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)		3 Ha	30,000,000		1 KKP
			Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)		100 %	110,000,000		1 KKP
			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)		10 Orang	30,000,000		1 KKP
			Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)		1 Kelompok	40,000,000		1 KKP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2023			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)		30 Orang	40,000,000		1 KKP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2023			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			UPT. KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL BANGGAI DALAKA				500,000,000		1 KKP
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KELAUTAN DAN PERIKANAN)		64 Indeks	233,100,000		12 kab/ 1 kota
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan		1 laporan	50,000,000		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas		1 Dokumen	50,000,000		12 kab/ 1 kota
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian(dokumen)		1 dokumen	30,000,000		12 kab/ 1 kota
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti		1 Orang	30,000,000		12 kab/ 1 kota
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (laporan)		1 laporan	50,000,000		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		1 paket	30,000,000		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)		1 paket	10,000,000		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	10,000,000		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 laporan	78,200,000		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan		1 Laporan	18,200,000		12 kab/ 1 kota
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)		1 Laporan	60,000,000		12 kab/ 1 kota
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)		1 Laporan	24,900,000		12 kab/ 1 kota
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		1 Unit	12,450,000		12 kab/ 1 kota
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)		1 Unit	12,450,000		12 kab/ 1 kota
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		100 %	266,900,000		1 KKP
			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (%)		70 %	156,900,000		
			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)		132.189 Ha	126,900,000		1 KKP

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2023			
								Target	Rp		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
					Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Ha)		856.649, 13 Ha				1 KKP
				Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)		3 Ha	30,000,000			1 KKP
				<i>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%)		100 %	110,000,000			1 KKP
				Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)		10 Orang	30,000,000			1 KKP
				Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)		1 Kelompok	40,000,000			1 KKP
				Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)		30 Orang	40,000,000			1 KKP